

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL PENGOLAHAN JAMBU METE DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL: PENGOLAHAN JAMBU METE DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

HASIL KAJIAN

2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal: Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggungjawab

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

Koordinator

Ir. Mohamad Yani Marsidik

Penulis

Lisa Yuniarti, S.P., M.Si.

Slamet Rahmat Topo Susilo, S.S., M.Kesos.

Ir. Retno Anggraini

Farida Yustina Noer Fathoni Putri

Sonia Fany Satria, S.Hum.

Desain Cover dan Tata Letak

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ISBN Dicetak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi agenda pembangunan global hingga tahun 2030 mendatang memiliki prinsip pencapaian pembangunan yang inklusif, yaitu tidak meninggalkan satu orangpun (No-one Left Behind). Selain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan harus dilakukan secara merata, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat

Angka capaian ekonomi pedesaan beberapa tahun ini meningkat berkat Dana Desa, namun ketimpangan, terutama di perdesaan, masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, sektor pertanian dengan berproduktivitas rendah, serta keterbatasan infrastruktur layanan dasar, padahal sejatinya tujuan pembangunan itu untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bersamaan.

Keterlibatan perempuan yang dibuktikan dengan tingginya jumlah rumah tangga usaha pertanian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai program yang harus diprioritaskan. Pemberdayaan sebagai salah satu strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan mengasah keterampilan perempuan.

Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan pada kenyataannya masih banyak yang belum berdaya karena berbagai faktor penyebab yang melatar belaknginya. Faktor-faktor tersebut ada

yang bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya

Untuk itu Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) memberikan rekomendasi pentingnya campur tangan pihak pemerintah setempat dalam hal menyediakan media pemasaran karena yang menjadi kendala selama ini adalah tempat untuk memasarkan produknya agar bisa dipasarkan secara berkesinambungan. Selain itu adanya program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal yaitu produk samping dalam pengolahan jambu mete juga diperlukan sebagai nilai tambah. Terakhir, inovasi teknologi harus terus diupayakan sebagai langkah penting dan strategis dalam membantu petani jambu mete untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, baik kualitas maupun kuantitas, walaupun kondisi petani masih jauh dari yang diharapkan, karena dukungan untuk memperbaiki kondisi tersebut tidak terlepas dari pengambil kebijakan

Saya harap, Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) ini menjadi ajang penggalangan pemikiran bersama para pemangku kepentingan agar dapat berkolaborasi mendorong kemajuan pembangunan Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

KETUA TIM KAJIAN

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang diberikan sehingga Penyusunan Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran umum terkait pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal pada pengolahan jambu mete dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi beserta kendala dan hambatan yang dihadapi.

Secara turun-temurun mete dari Nusa Tenggara Timur (NTT) telah dikenal sebagai primadona yang melegenda, namun pada kenyataannya hasil panen jambu mete dihadapkan dengan posisi tawar yang rendah terhadap pasar sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan. Untuk itu peran strategis petani perempuan perlu dimaksimalkan melalui program-program pemberdayaan agar memberikan kontribusi positif dalam sektor pertanian jambu mete.

Melalui Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder pegiat pedesaan sebagai literasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) ini melalui kerjasama yang baik. Besar harapan, Laporan Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal (Studi Kasus Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur) dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dalam mendorong kemajuan desa.

Lisa Yuniarti, S.P., M.Si.

NIP.19620615 198603 2 001

Ketua Tim Kajian Pemberdayaan Perempuan di Daerah Tertinggal:
Pengolahan Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3. TUJUAN PENELITIAN	8
1.4. SASARAN.....	8
1.5. MANFAAT.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL ..	11
2.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.....	14
2.3. SEKILAS TENTANG JAMBU METE (<i>ANACARDIUM</i> <i>OCCIDENTALE L.</i>)	21
3. METODE PENELITIAN	25
3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	25
3.2. METODE PENELITIAN.....	25
3.3. DATA DAN SUMBER DATA	26

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA	27
3.5. METODE PENGAMBILAN SAMPEL	27
3.6. MANFAAT	28
4. GAMBARAN UMUM LOKASI	29
4.1. KABUPATEN SUMBA TIMUR	29
4.1.1. KECAMATAN PAHUNGA LODU	34
4.1.2. DESA PALANGGAY	35
4.2. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	39
4.2.1. KECAMATAN LOURA	45
4.2.2. DESA RAMMA DANA	47
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL	51
5.2. PEREMPUAN DALAM ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	54
5.3. PEREMPUAN DALAM PENGOLAHAN JAMBU METE	57
5.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI (KWT)	62
5.5. KENDALA DAN HAMBATAN PENGOLAHAN BUAH JAMBU METE	65
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	69
6.1. KESIMPULAN	69
6.2. REKOMENDASI	70
Daftar Pustaka	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Timeline Jadwal Kajian.....	28
Tabel 2.	Produksi Tanaman Perkebunan di Sumba Timur Tahun 2020	33
Tabel 3.	Luas Tanaman Jambu Mete Terbanyak di Sumba Barat Daya Tahun 2020	43
Tabel 4.	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019.....	44
Tabel 5.	Luas Lahan Tanaman Jambu Mete 2018 -2020 di Kecamatan Loura.....	46
Tabel 6.	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Tanaman Tahunan, Berdasarkan 5 Jenis Tanaman yang Banyak Diusahakan di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Index Pembangunan Gender (2016-2020).....	3
Gambar 2. Index Pemberdayaan Gender (2016-2020)	4
Gambar 3. Index Pembangunan Manusia (2016-2020).....	4
Gambar 4. Peringkat <i>Global Gender GAP</i> Indonesia (2016-2021).....	5
Gambar 5. Diagram Alur Penggunaan Produksi Jambu Mete	22
Gambar 6. Jambu Mete dan Hasil Olahannya	22
Gambar 7. Peta Kabupaten Sumba Timur.....	31
Gambar 8. Peta Kecamatan Pahunga Lodu	34
Gambar 9. Peta Kabupaten Sumba Barat Daya	40
Gambar 10. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Kecamatan Tahun 2019...	40
Gambar 11. Bagan Alur Rantai Pasok di Kabupaten Sumba Barat Daya	50
Gambar 12. Alur Proses Pengolahan Mete di Tingkat Rumahtangga.....	67

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perempuan desa di daerah tertinggal merupakan satu ekosistem yang tidak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk-produk pertanian, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal.

Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia khususnya yang berada di daerah tertinggal dan berekonomi miskin peran ganda bukanlah sesuatu hal yang baru. Bekerjanya kaum perempuan di luar pekerjaan domestik membuat para perempuan akan lebih maju dan tangguh dalam bergerak maupun berfikir.

Pemerintah juga telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner bagi pembangunan. Gerakan pemberdayaan perempuan yang berkembang dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai

pendekatan *Women In Development* dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam pembangunan nasional.

Andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. *Women In Development Approach (WID)* yang diperkenalkan oleh *United States Agency for International Development (USAID)* menyatakan bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional.

Dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada point ke-5 (keterlibatan perempuan desa), yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Keterlibatan perempuan diperlukam tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan sesuai prinsip *SDG's* yaitu "*No One Left Behind*" (jangan ada yang tertinggal) bukan hanya dalam hal subyek penerima manfaat program pembangunan tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan substansi. Pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan. Salah satu tujuannya yang tertuang dalam keterlibatan perempuan desa yaitu keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

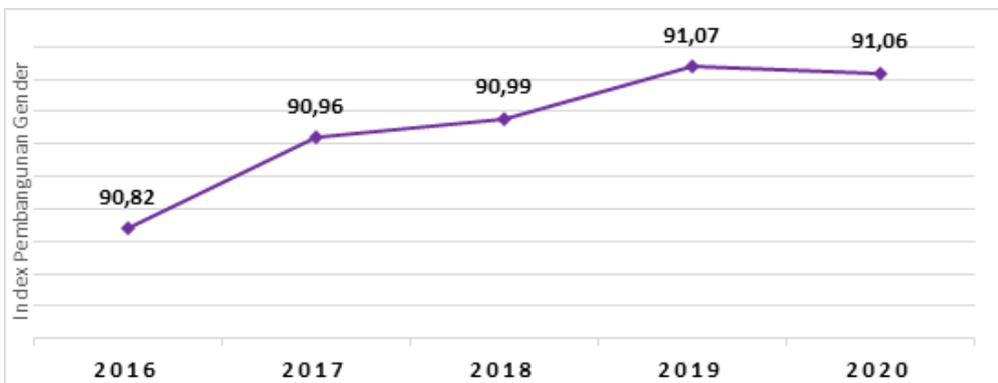
Keterlibatan perempuan juga telah diakomodir oleh segenap peraturan pembangunan nasional, seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyajikan keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa dan di perkuat oleh Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Data BPS hasil Survei Pertanian antar Sensus (Sutas) 2018 menyebutkan, jumlah petani perempuan di Indonesia sekitar 8 juta orang. Hampir 24 persen dari 25,4 juta orang petani adalah petani perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia tahun 2020 mencapai 91,06 atau mengalami penurunan 0,01 poin dibanding 2019 yang mencapai 91,07. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 mencapai 75,57 sedangkan tahun 2019 sebesar 75,24 atau naik 0,33 poin. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 perempuan mendapatkan 69,19 dan pria mendapatkan 75,98 sedangkan rata-rata IPM nasional sebesar 71,94 artinya IPM wanita dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan *Global Gender GAP* dari *World Economic Forum* yang mengkaji partisipasi wanita di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Politik pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 101 dari 156 negara atau turun 16 peringkat dimana pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 85 dari 153 negara.

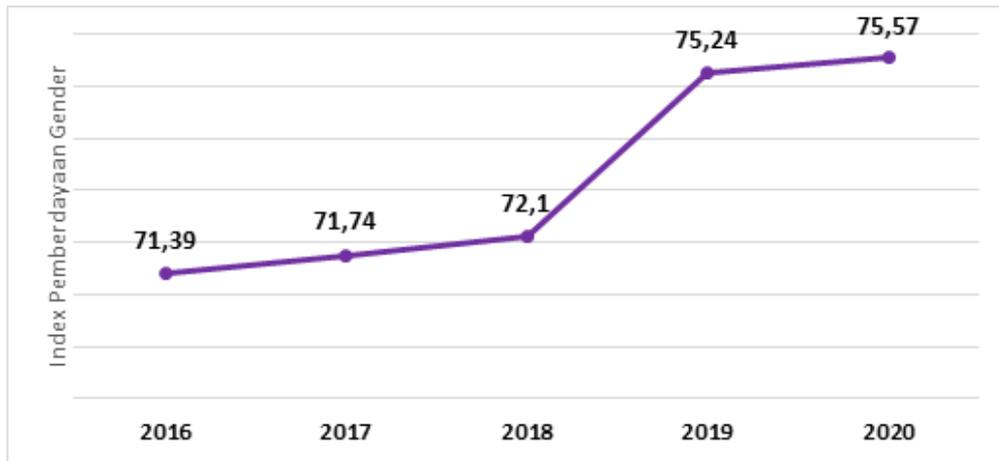
Sedangkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Indeks IPG tahun 2020 mencapai 92,73 naik 0,01 poin dibanding 2019 yang mencapai 92,72. IDG tahun 2020 mencapai 74,53 naik 1,16 poin dibanding 2019 mencapai 73,37. Untuk IPM Wanita tahun 2020 sebesar 64,13 dan IPM Pria sebesar 69,16 artinya IPM Wanita dibawah 5,03 poin dari Pria.

Gambar 1. Index Pembangunan Gender (2016 - 2020)



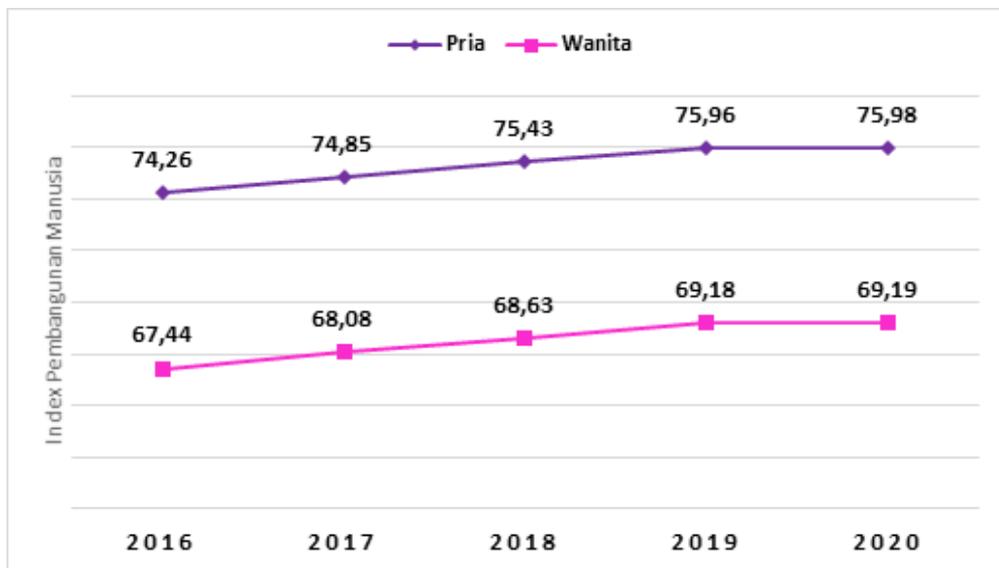
Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2. Index Pemberdayaan Gender (2016-2020)

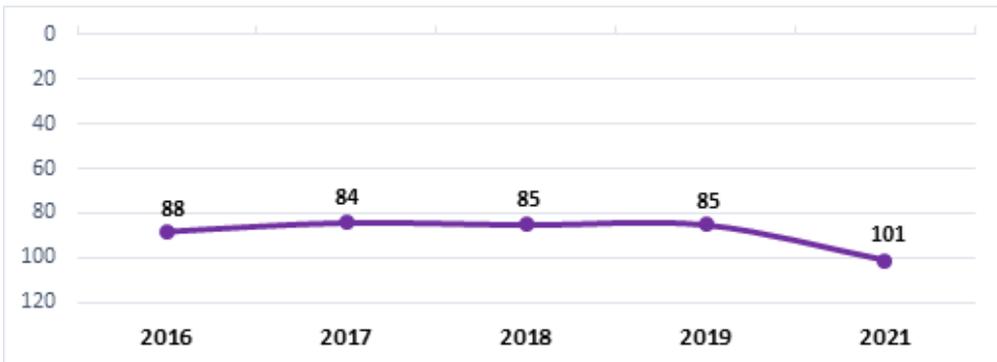


Sumber: www.bps.go.id

Gambar 3. Index Pembangunan Manusia (2016 - 2020)



Sumber: www.bps.go.id

Gambar 4. Peringkat Global Gender GAP Indonesia (2016-2021)

Sumber: www.weforum.org

Catatan: Pada tahun 2020 tidak ada laporan peringkat Global Gender GAP

BPS (2018), mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian dengan perempuan sebagai pemimpin dalam rumah tangga berjumlah sekitar 2,8 juta rumah tangga. Disini terlihat jelas adanya keterlibatan perempuan di usaha tani perdesaan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian tidak sedikit jumlahnya. Namun, di tengah peran strategis petani perempuan dalam mendukung kegiatan pertanian, mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan kualitas hidup mereka. Ketangguhan petani perempuan tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap ketangguhan sektor pertanian.

Karena mayoritas mata pencaharian penduduk di daerah tertinggal yang berada di Provinsi NTT adalah bertani maka kebanyakan perempuan ikut bekerja di bidang pertanian. Pertanian yang digeluti yaitu di perkebunan jambu mete, karena Provinsi NTT merupakan wilayah dengan luas tanaman jambu mete terluas di Indonesia, maka banyak ditemui perempuan yang bekerja pada perkebunan tersebut. Tanaman ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, harganya cukup stabil dan prospek pasarnya baik di dalam maupun luar negeri.

Provinsi NTT juga dijadikan daerah pengembangan jambu mete karena memiliki tipe iklim relatif kering. Khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya yang menempati urutan ketiga sebagai penghasil jambu mete di Provinsi NTT setelah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka, sehingga prospek pengembangan jambu mete di Kabupaten Sumba Barat Daya kedepannya diharapkan meningkat.

Menurut Statistik Perkebunan Indonesia (2018), Provinsi NTT merupakan penghasil jambu mete terbesar di Indonesia yaitu sebesar 51.433 ton dari luas areal 88.673 Ha. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan 2019, Kabupaten Kupang termasuk dalam 5 besar kabupaten yang memiliki luasan jambu mete produktif, dengan luasan 6.593 Ha dan jumlah produksi sebesar 1.997 ton. (Statistik Perkebunan Indonesia, 2018).

Sentra tanaman jambu mete tersebar di Kawasan Timur Indonesia dan sebagian besar ($\pm 98\%$) diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat. Penghasil utama mete di Indonesia yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. (Kementan, 2020).

Dikarenakan Provinsi NTT merupakan penghasil jambu mete, maka keterlibatan perempuan dalam pengolahan jambu mete sangat dibutuhkan mulai dari membantu memanen, mengolah dan melakukan proses penanganan pasca panen yang merupakan pekerjaan harian yang lazim bagi kaum perempuan di Provinsi NTT. Tanaman ini sudah lama dibudidayakan, terutama pada lahan marginal beriklim kering di Indonesia Timur khususnya Provinsi NTT. Kondisi lahan umumnya tanah berbatu dan tingkat kesuburan relatif rendah. Hal ini terjadi karena pada awalnya penanaman jambu mete dimaksudkan untuk penghijauan dan rehabilitasi lahan (Daras dan Pitono, 2006). Namun, karena hasil gelondong jambu mete bernilai ekonomi, maka banyak masyarakat yang menanam jambu mete secara sukarela dimana keterlibatan perempuan

dalam membantu sangat dibutuhkan terutama dalam pengolahannya menjadi kacang mete siap jual.

Melihat keterlibatan perempuan dalam pengolahan jambu mete, maka pemberdayaan perempuan menjadi salah satu sasaran yang perlu digulirkan oleh pemerintah, apalagi dengan adanya isu kemiskinan yang paling banyak dialami daerah tertinggal seperti Provinsi NTT yang merupakan provinsi yang berada pada urutan ketiga di Indonesia dengan kabupaten tertinggal terbanyak.

Meskipun Provinsi NTT diklasifikasi sebagai daerah tertinggal namun secara umum wilayah-wilayah tertentu yang terbukti dengan tanaman jambu metenya potensial secara ekonomi untuk dikembangkan sebagai komoditas andalan daerah. Seringkali potensi tersebut tidak berkembang optimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, misalnya dalam mengolah, memasarkan serta pemilikan modal.

Oleh karena itu, perlu adanya salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam pemberdayaan perempuan yang bekerja pada pengolahan jambu mete di Provinsi NTT.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Keterlibatan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya semakin penting terutama dalam sumbangan ekonomi bagi keluarga. Dengan adanya perkebunan rakyat di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya yang luas, dimana keterlibatan perempuan sangat diperlukan, maka diperlukan pemberdayaan perempuan dalam pengolahan jambu mete.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya?
2. Apa saja yang menjadi kendala pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya?
3. Hambatan- hambatan apa yang dihadapi pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.
2. Mengidentifikasi kendala pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam proses pengolahan jambu mete di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.

1.4. SASARAN

Sasaran kajian adalah diperoleh informasi tentang pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam pengolahan jambu mete di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya sebagai masukan dalam kebijakan.

1.5. MANFAAT

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah (stakeholder) terhadap pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal dalam upaya pengembangan perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 2011).

Menurut Sulistiyani A.T. (2004), pemberdayaan sebagai suatu proses, yang dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap yang dalam pemberdayaan yaitu:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tujuan pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai, adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut menurut Suharto, Edi (2014), pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Kebijakan Dasar Pemberdayaan Perempuan;

1. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dilakukan melalui “*one door policy*” atau kebijakan satu pintu,
2. Peningkatan kualitas SDM perempuan,
3. Pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan,
4. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan,
5. Penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan,
6. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak,
7. Pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan,
8. Peningkatan peran serta masyarakat,

9. Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan,
10. Peningkatan penerapan komitmen internasional.

Dari bermacam-macam konsep pemberdayaan menurut para ahli, pada prinsipnya pemberdayaan dapat difahami sebagai upaya mendorong kemampuan warga lokal dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, dimana pihak luar (pemerintah dan pihak lainnya) hanya berfungsi sebagai fasilitas.

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan mengasah keterampilan perempuan khususnya dalam kajian ini yaitu pengolahan jambu mete dan hasil sampingnya yang selanjutnya dapat dijadikan *home industry*.

Dalam hal peningkatan ekonomi khususnya di daerah tertinggal, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Selain itu perempuan juga dihadapkan pada kendala tertentu yang dikenal dengan istilah "*triple burden of women*", yaitu perempuan harus melakukan produksi dan fungsi sosial secara bersamaan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

2.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal yaitu, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 tercatat 13 kabupaten di NTT yang masuk daerah tertinggal. Ketiga belas daerah tersebut adalah Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua serta Kabupaten Malaka.

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial budaya. Dalam konteks demikian, pengembangan aspek sosial budaya lokal masyarakat daerah tertinggal perlu mendapat perhatian secara proporsional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Sering terjadi dan banyak contoh, pengembangan aspek sosial budaya menjadi pemicu perkembangan aspek ekonomi suatu masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat daerah tertinggal menjadi prioritas pilihan.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal berfokus kepada empat kegiatan prioritas. Apabila diurutkan maka kegiatan prioritas paling utama ialah kegiatan pemenuhan pelayanan dasar publik, lalu peningkatan aksesibilitas/konektifitas di daerah, pengembangan ekonomi lokal, serta yang terakhir terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketertinggalannya belum mampu mengikuti pola pemberdayaan yang terpadu sebagai *style of development* oleh karena beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
2. Masyarakat masih terbelenggu oleh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer atau ekonomi subsistem.
3. Model pembangunan yang sentralistik menjadikan masyarakat menjadi tidak kreatif dan tergantung pada apa yang berasal dari pemerintah kabupaten saja.

Menurut Bappenas, pembangunan daerah tertinggal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Setidaknya dapat dilakukan melalui strategi:

1. Pengembangan ekonomi lokal, yang diarahkan untuk mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumber daya kelembagaan, serta sumber daya fisik) yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada;
2. Pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik;
3. Perluasan kesempatan, strategi ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju;
4. Peningkatan kapasitas, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah tertinggal; dan

5. Peningkatan mitigasi, rehabilitasi, strategi ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan.

Perekonomian masyarakat merupakan salah satu indikator dalam penentuan Daerah Tertinggal, salah satu bentuk intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal adalah dengan mengembangkan produk unggulan di daerah tertinggal. Produk unggulan tersebut diharapkan dapat dijalankan oleh Bumdes dan Bumdesma (Bumdes bersama) di setiap kabupaten tertinggal, sehingga dengan pengembangan produk unggulan di daerah tertinggal dapat meningkatnya perekonomian masyarakat di suatu wilayah dan diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi indikator lain di daerah tertinggal.

Terkait dengan tugas pemerintah dalam mengentaskan daerah tertinggal, terdapat lima hal yang perlu didorong, yaitu kebijakan fiskal bagi daerah tertinggal, mendorong tata kelola sumberdaya alam, mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mendorong kebijakan sinergis antara pusat dan daerah serta mendorong stakeholders untuk mempunyai cara pandang yang sama dan keberpihakan pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga para pengusaha atau stakeholder.

Untuk tahun 2020-2024, pembangunan daerah tertinggal fokus kepada 62 kabupaten daerah tertinggal, di mana 60 kabupaten daerah tertinggal masih belum terentaskan di periode 2015-2019 ditambah Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak sebagai daerah otonom baru. Menurut Bappenas ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor.

Salah satu koridor, pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Koridor lainnya pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak satupun masyarakat yang tertinggal (no one left behind).

Strategi kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Strategi ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 kabupaten daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan.

Strategi dirancang agar mencapai target 25 daerah keluar dari klasifikasi daerah tertinggal pada 2024. Skenario rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 58,82 pada 2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik menurun dari 25,82 persen di 2019 menjadi 23,5–24 persen di 2024.

Dalam konteks desa, pemerintah mendorong setiap daerah tertinggal mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini penting mengingat banyaknya potensi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di 62 kabupaten daerah tertinggal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal, dimana persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada 2018 yang berjumlah 26,12 persen, dapat berkurang cukup signifikan hingga 23,5 hingga 24 persen sampai 2024 mendatang. Sebaliknya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal yang 58,11 persen pada 2018 naik hingga 62,2 sampai 62,7 persen pada 2024. Sedangkan jumlah daerah tertinggal dari 62 kabupaten pada 2019 berkurang hingga 37 kabupaten pada 2024. Sehingga 25 kabupaten terentaskan pada 2024 mendatang.

Target sasaran program pembangunan daerah tertinggal 2020-2024, khusus di 2021 ditargetkan entas 6 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Dimana penduduk miskinnya diproyeksi menurun dari 24,6 hingga 25,1 persen. Sedangkan rata-rata IPM (Indeks Pembangunan Manusiannya) naik dari 59,8 pada 2020 menjadi 60 hingga 60,5 pada 2021.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menjelaskan tujuan PPDT antara lain mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional.

Adapun Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

1. Pengembangan perekonomian masyarakat melalui pelatihan pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi akses permodalan melalui crowdfunding dan peer to peer lending, membuka peluang pasar ekspor, serta kegiatan pendukung lainnya berkolaborasi bersama mitra;
2. Peningkatan SDM melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan guru serta meningkatkan layanan yang ada dengan dukungan teknologi di bidang terkait;

3. Percepatan pembangunan sarana-prasarana/infrastruktur wilayah untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian SPM serta peningkatan konektivitas dan sistem logistik antar wilayah;
4. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung PPDT melalui pengembangan ekonomi digital serta pemanfaatan pada layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya;
5. Peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah tertentu melalui pengembangan sosial, ekonomi dan kawasan sesuai karakteristik wilayah;
6. Pembinaan terhadap daerah tertinggal entas Tahun 2019 melalui peningkatan daya saing dan kerja sama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian daerah;
7. Penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19 melalui pencegahan dan pendekatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan jaring pengaman sosial, peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, revitalisasi ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi daerah dan nasional

Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh. Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk:

1. Memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan;

2. Melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3ha/KK);
3. Melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan forestry (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan;
4. Mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan;
5. Mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah;
6. Meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang;
7. Mendorong upaya peningkatan nilai tambah (value added) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan;
8. Memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan

2.3. SEKILAS TENTANG JAMBU METE (*ANACARDIUM OCCIDENTALE L.*)

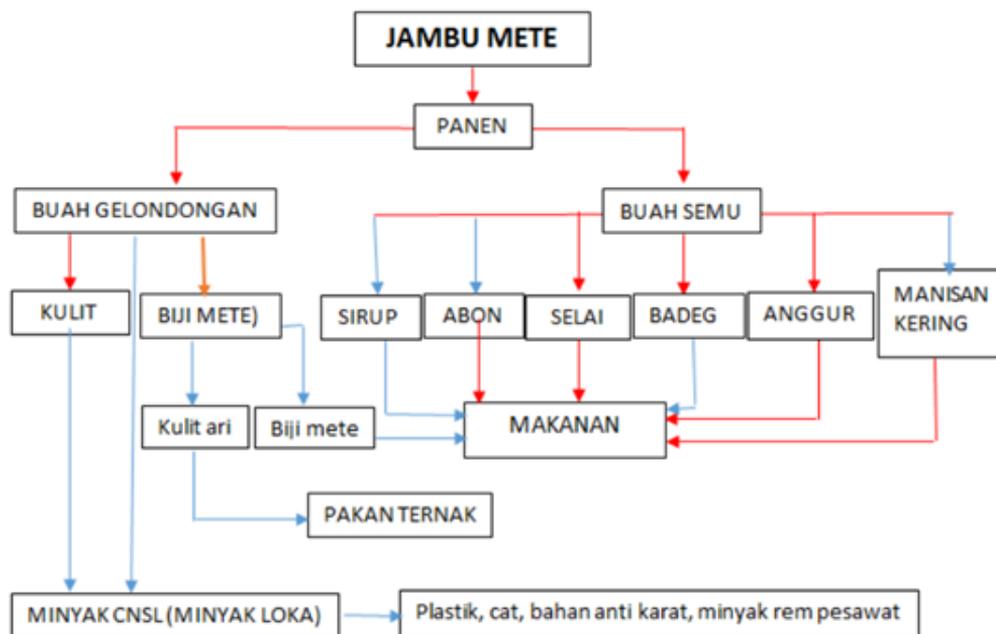
Jambu mete (*Anacardium occidentale. L*) merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang memiliki arti ekonomis dan cukup potensial karena produksinya dapat dipakai sebagai bahan baku industri makanan. Selain sebagai tanaman yang produktif, jambu mete bermanfaat juga sebagai tanaman penghijau dan tanaman konservasi dan rehabilitasi lahan kritis

Jambu mete juga merupakan salah satu sumber devisa negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani di lahan marginal seperti NTT. Komoditas perkebunan yang dapat memberikan sumbangan perolehan pendapatan daerah dan dapat memberikan pendapatan yang tinggi pada petani, karena luas areal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur cukup luas dan berpotensi untuk dikembangkan.

Produk utamanya adalah biji kacang mete sedangkan buah semu dari jambu mete dapat diolah menjadi sirup, anggur, abon, selai, dodol, nata de cashew dan pakan ternak. Kulit glondong jambu mete setelah dipisahkan dari kacangnya dibuang sebagai limbah. Limbah ini dapat diolah menjadi minyak CNSL atau (*Cashew Nutshell Liquid*) untuk campuran bensin, cat genteng, serta untuk kepentingan industri seperti minyak rem. Minyak mete juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat kayu karena terdapat senyawa kardanol sekitar 70 persen (Gambar 5).

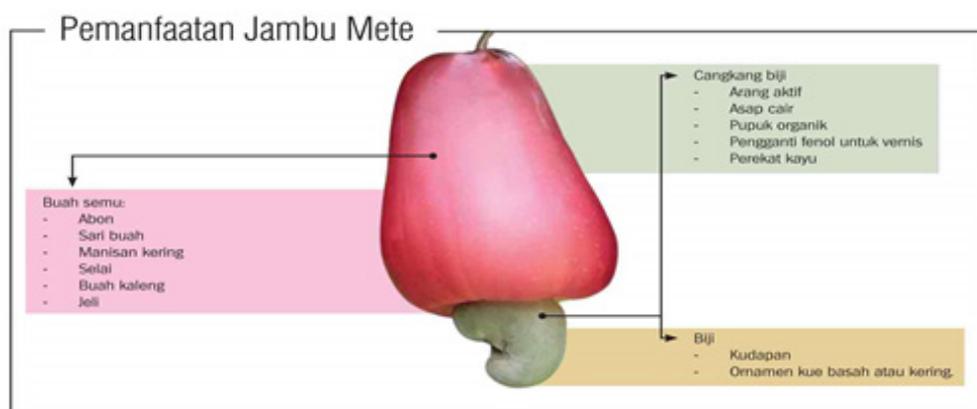
Pemanfaatan minyak dari kulit jambu mete untuk perekat kayu dapat menghemat devisa pada industri kayu lapis nasional karena tidak mengimpor fenol formaldehid.

Gambar 5. Diagram Alur Penggunaan Produksi Jambu Mete



Adapun tahapan pengolahan mete yaitu: pemilihan gelondong, penjemuran, pengupasan, penyangraian, pelepasan tesa/kulit ari, sortasi, penjemuran/pengeringan dan pengemasan. Pada tahapan pengolahan mete banyak dijumpai perempuan yang mengerjakannya. Keterlibatan perempuan sangat diperlukam dalam pasca panen jambu mete. Hasil samping dari pemanenan yang belum banyak dimanfaatkan terutama buah semu yang dapat dijadikan beragam olahan lokal yang banyak dikerjakan oleh perempuan.

Gambar 6. Jambu Mete dan Hasil Olahannya



Pengolahan kacang mete bukanlah perkara mudah, mayoritas kacang mete yang sudah dijual bebas merupakan kacang mete yang telah mengalami proses pengolahan yang cukup panjang. Mahalnya harga kacang mete juga disebabkan dari sulitnya pengolahan dan waktu yang dibutuhkan. Setelah dipanen, kacang mete harus dijemur dulu selama 3 hari sampai benar-benar kering, lalu dipisahkan antara kulit dengan isi kacang menggunakan alat khusus. Proses mengeluarkan kacang dari pembungkusnya ini haruslah hati-hati agar kacang mete tidak ikut rusak, mete yang telah dikupas menggunakan kaci lalu dikeringkan, setelah itu masuk tahap akhir yakni pengelupasan kulit dari mete hingga bersih. Proses satu ini memakan waktu yang cukup lama karena sehari hanya bisa menghasilkan 1 kilogram/orang.

Pada saat ini pengembangan tanaman jambu mete tidak hanya dijadikan sebagai upaya konservasi atau merehabilitasi lahan kritis tetapi lebih luas lagi karena nilai ekonominya tinggi, sehingga jambu mete menjadi komoditas unggulan nasional. Perubahan status jambu mete menjadi komoditas unggulan memerlukan penekanan dalam pengembangannya kedepan menjadi pengembangan yang berorientasi agribisnis. Jadi orientasi agribisnis yang dikembangkan dan diharapkan dapat meningkatkan produksi dan mutu guna memenuhi kebutuhan baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Tanaman jambu mete ini, bagi masyarakat NTT, sebetulnya bukan jenis tanaman baru sama sekali. Tanaman ini sudah dikenal oleh nenek-moyang mereka sejak lama. Artinya, sudah ada dan tumbuh subur di padang-padang dan hutan-hutan savana Sumba. Namun populasinya hanya dapat dihitung dengan jari dan belum ada manfaatnya, kecuali buah semunya yang bisa dimakan oleh orang-orang yang sedang gembala ternak atau sedang berladang.

3

METODE PENELITIAN

3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Kajian ini di laksanakan selama 8 (delapan) bulan yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2021 mulai dari persiapan sampai dengan penyusunan laporan. Lokasi kajian adalah NTT yang merupakan provinsi yang berada pada urutan ketiga di Indonesia dengan kabupaten tertinggal terbanyak. Adapun Kabuapten kajian yaitu di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya.

3.2. METODE PENELITIAN

Kajian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah berupa kajian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2015).

Yang membedakan metode studi kasus dengan metode penelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnya pada kasus yang lebih spesifik (baik kejadian maupun fenomena tertentu).

Subyek pelaku adalah perempuan yang sudah berkeluarga dan membantu ekonomi keluarga dalam pengolahan jambu mete pasca panen.

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri dengan dibantu instrumen lain yaitu pedoman wawancara, observasi. Peneliti sebagai instrumen utama karena hanya peneliti yang dapat bertindak sebagai alat pengumpul data dan responsif terhadap realitas karena bersifat kompleks. Bekal informasi awal, peneliti melakukan observasi secara mendalam melalui wawancara dengan kaum perempuan, serta melakukan observasi. (Nawawi dan Martini, 2005).

Peneliti merupakan perencana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian tepat karena menjadi segalanya dan keseluruhan proses penelitian. Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai alat pengumpul data (Moleong, 2010).

Adapun analisis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif atau deskriptif research dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan penelitian yang telahannya diarahkan pada suatu kasus secara intensif, detail dan mendalam yang memberikan gambaran mengenai data dan kejadian berdasarkan fakta-fakta yang muncul saat peneliti melakukan penelitian pada objek melalui proses pengukuran dengan alat yang baku dan objektif.

3.3. DATA DAN SUMBER DATA

Dalam penulisan kajian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang berasal dan diperoleh langsung dari informan kunci (*key informan*) yaitu orang yang berkompeten dan mengetahui banyak mengenai proses pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pengolahan jambu mete di Sumba Barat Daya dan Sumba Timur,

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan, data yang berupa dokumen tertulis diperoleh dari laporan-laporan mengenai pemberdayaan perempuan yang bekerja pada pengolahan jambu mete di NTT.

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam kajian ini yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada perempuan yang ikut dalam pengolahan jambu mete, tidak dilaksanakan dengan struktur yang ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokuskan pada permasalahan, sehingga informasi yang diperoleh semakin mendalam. Kelonggaran semacam ini mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka mengenai pemberdayaan perempuan.
2. Observasi langsung, dalam melaksanakan observasi langsung peneliti akan melihat realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapinya.
3. Dokumentasi, teknik ini untuk mencapai data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang relevan yang terdapat pada instansi atau pengelola langsung terkait dengan program pemberdayaan perempuan.

3.5. METODE PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi dalam kajian ini yaitu perempuan yang sudah berkeluarga dan bekerja pada pengolahan jambu mete. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih perempuan yang masih bersuami dan bekerja pada pasca panen dan pengolahan jambu mete.

Data yang telah terkumpul, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan: reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Metode triangulasi juga digunakan untuk validasi data penelitian dengan sumber.

3.6. MANFAAT

Manfaat dari kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis oleh pemerintah (stakeholder) terhadap pemberdayaan perempuan dalam upaya pengembangan perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

TABEL 1. TIMELINE JADWAL KAJIAN

Kegiatan	Bulan							
	Mar	Aprl	Mei	Juni	Agt	Sept	Okt	Nov
Persiapan	■							
Penyusunan dan pembahasan proposal	■	■						
Penyusunan instrument penelitian		■						
Pengumpulan data lapang		■	■	■	■			
Pengolahan data Primer dan sekunder			■	■	■			
Analisa data primer dan sekunder			■	■	■			
Penyusunan laporan sementara					■	■		
Pembahasan laporan.							■	
Peyempurnaan laporan akhir								■

4

GAMBARAN UMUM LOKASI

4.1. KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian Selatan dan salah satu dari empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur memiliki 3 (tiga) pulau kecil yaitu Pulau Prai Salura, Pulau Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenduduk). Secara geografis Kabupaten Sumba Timur terletak antara $119^{\circ}45 - 120^{\circ}52$ Bujur Timur (BT) dan $9^{\circ}16 - 10^{\circ}20$ Lintang Selatan (LS). dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah.

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.

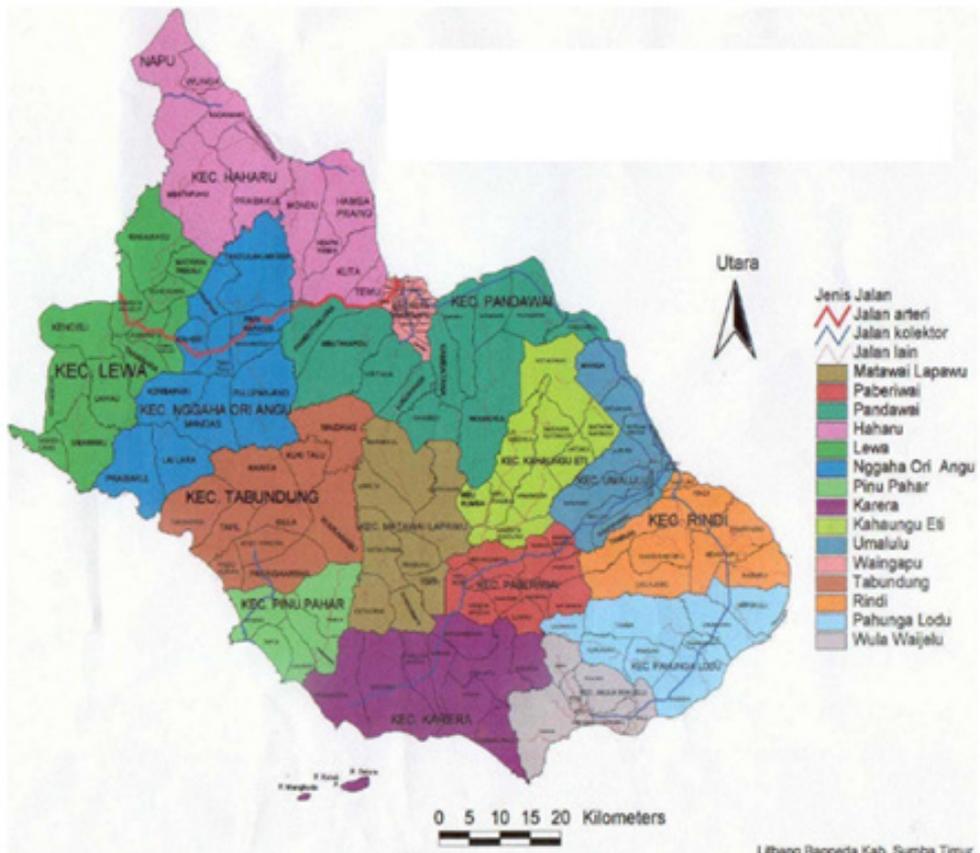
Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah seluas $7.000,5 \text{ km}^2$, sedangkan wilayah laut seluas $8.373,53 \text{ km}^2$ dengan panjang garis pantai $433,6 \text{ km}^2$. Secara administrasi, sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan di Sumba Timur menjadi 22 kecamatan,

16 kelurahan dan 140 desa. Kabupaten Sumba Timur dipimpin oleh seorang Bupati dengan ibukota kabupaten adalah Waingapu yang terletak di kecamatan Kota Waingapu.

Wilayah daratan Sumba Timur tersebar pada 1 pulau utama (Pulau Sumba) dan 3 pulau kecil yaitu Pulau Prai Salura, Pulau Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenduduk). Sekitar 40% luas Sumba Timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian Selatan, dimana lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur, sementara daerah bagian Utara berupa dataran yang berbatu dan kurang subur.

Kecamatan Haharu merupakan kecamatan di Kabupaten Sumba Timur yang paling luas dengan prosentase 8,59%, sedangkan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kambera dengan prosentase 0,74% dari total luas Kabupaten.

Gambar 7. Peta Kabupaten Sumba Timur



Sumber: Kabupaten Sumba Timur Dalam Angka, 2021

Jumlah Penduduk sebesar 244.820 jiwa, terdiri dari laki-laki 125.967 jiwa dan perempuan 118.853 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini rata-rata adalah sebesar 0,70 % per tahun dengan total luas wilayah 7.000,5 km², kepadatan penduduk adalah 35 jiwa/km² (BPS 2020).

Kepadatan tertinggi di Kecamatan Kampera, yaitu 644 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah ada di Kecamatan Katala Hamu Lingu dan Kecamatan Kambata Mapambuhang, yaitu 9 jiwa/km². Konsentrasi penduduk paling padat berada di Kecamatan Kampera dan Kota Waingapu dimana kedua kecamatan tersebut merupakan kawasan perkotaan, wilayah tersebut mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Penduduk Kabupaten Sumba Timur umumnya adalah suku Sumba asli, namun terdapat juga suku Sabu, keturunan Tionghoa, Arab, Bugis, Jawa dan penduduk yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur lainnya. Bahasa daerah yang digunakan adalah Bahasa Sumba Kampera. Sebagian besar penduduk di kabupaten ini beragama Protestan. Selebihnya adalah Islam, Hindu dan Budha. Sekitar 39 persen lagi adalah beragama tradisional Marapu.

Tingkat pendidikan penduduk telah berkembang cukup baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang telah menamatkan jenjang pendidikan SLTP dan SLTA/SMK cukup besar, yakni mencapai angka 12%, sementara yang sedang melaksanakan jenjang pendidikan SD adalah lebih dari 58 % dari jumlah penduduk usia sekolah.

Mata pencaharian penduduk masih didominasi di bidang pertanian, termasuk subsektor peternakan dan nelayan, terutama di daerah pedesaan. Walaupun sektor pertanian menempati tempat pertama dalam pendapatan regional, luas sawah yang bisa digarap baru 11 persen dari luas tanah kabupaten seluruhnya. Adapun di wilayah perkotaan, mata pencaharian penduduk sudah sangat beragam, seperti bidang transportasi, industri, jasa perbankan, dan jasa pelayanan lainnya. Lebih dari 70% penduduk di Kabupaten Sumba Timur melakukan aktivitas dan keragaan pekerjaannya berada pada wilayah pesisir.

Indeks Kedalaman Kemiskinan 6,20 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 1,95, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten sebesar 65,52. (BPS 2020). Kabupaten Sumba Timur termasuk kawasan kering. Lahan pertanian hanya terdapat di dataran pantai utara yang memiliki cukup air di permukaan maupun sungai-sungai besar dan memiliki bulan basah hanya sekitar tiga bulan dan curah hujan tahunannya kurang dari 1.000 mm, yakni sekitar 912 mm dengan bulan basah hanya 85 hari.

Rendahnya curah hujan berdampak pada terbatasnya variasi jenis dan produktivitas tanaman, sehingga bisa berakibat pada rendahnya hasil panen atau gagal panen. Komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat adalah jambu mete, kelapa, kemiri, pinang, kopi, kakao dan sirih. Adapun perkembangan tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2. PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DI SUMBA TIMUR TAHUN 2020

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Jambu Mete	9.764	3.424	0,35
2.	Kelapa	4.522	1.385	0,31
3.	Kemiri	2.446	942,5	0,39
4.	Pinang	2.118	697	0,33
5.	Kopi	1.145	263	0,23
6.	Kakao	738	45,6	0,06
7.	Sirih	571	227	0,40

Sumber: Sumba Timur Dalam Angka 2021

Luas areal tanaman perkebunan seluas 21.376 ha dengan total produksi pada tahun 2020 sebesar 7.011 ton. Terdapat lima jenis tanaman perkebunan yang cukup menonjol dalam hal produksi dimana produksi tertinggi ada pada komoditi jambu mete, diikuti kelapa, kemiri, pinang, kopi dan sirih. Sedangkan dari sisi produktivitas tertinggi ada pada komoditi sirih, diikuti kemiri, tembakau, jambu mete, pinang, kelapa dan kopi.

4.1.1. KECAMATAN PAHUNGA LODU

Lokasi kajian berada di Kecamatan Pahunga Lodu dengan ibukota Kecamatan Ngalu terletak di pulau Sumba bagian timur Kabupaten Sumba Timur. Luas wilayah Kecamatan Pahunga Lodu 349,8 Km² atau 34,980 Ha yang pada umumnya merupakan dataran rendah di sepanjang pantai timur, sedangkan sebelah barat dari timur ke selatan merupakan dataran tinggi yang cukup subur. Dimana musim hujannya relatif pendek bila dibandingkan musim kemarau.

Kecamatan Pahunga Lodu berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rindi,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wula Waijelu,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sawu,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mahu

Gambar 8. Peta Kecamatan Pahunga Lodu



Sumber: Kecamatan Pahunga Lodu Dalam Angka 2020

Jumlah penduduknya Kecamatan Pahunga Lodu sebanyak 13,542 jiwa, laki-laki 6.774 jiwa dan perempuan 6.768 jiwa, penduduk laki-laki hampir berimbang dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari rasio jenis kelamin yakni laki-laki sebanyak 6.207 jiwa dan perempuan 6.171 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 sebesar 0,63 %. Rasio Jenis Kelamin Penduduk 102,2.

Menurut sebaran penduduk perdesa, desa yang terbanyak penduduknya adalah Desa Kaliuda dengan jumlah penduduk 3.705 jiwa dan yang paling sedikit adalah Desa Palanggay dengan jumlah penduduk 704 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang di setiap desa.

Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian dengan persentase 77,37%, penduduk sangat bergantung pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun perkebunan. Selain tanaman pangan, juga memiliki beberapa komoditi tanaman perkebunan seperti jambu mete, kelapa, pinang, sirih, kemiri dan lain-lain. Luas lahan jambu mete di Kecamatan Pahunga Lodu seluas 210 Ha. Dengan rata-rata jumlah produksi 700-800 kg/tahun.

4.1.2. DESA PALANGGAY

Salah satu lokus desa kajian adalah Desa Palanggay dengan luas wilayah Desa Palanggay 33,5 Km² dan jumlah penduduk 799 jiwa diantaranya laki-laki 393 jiwa dan perempuan 406 jiwa, dengan rata-rata anggota rumah tangga 5 orang. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan 15 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten 110 km.

Desa Palanggay mempunyai budaya pedesaan yang kental, masyarakatnya kebanyakan bercocok tanam dan berdagang. Mayoritas masyarakat yang ada di daerah ini memiliki pekerjaan sebagai petani jambu mete. Setiap tahunnya masyarakat setempat mendapatkan hasil utama perkebunan mereka adalah buah jambu mete. Rata-rata setiap KK mempunyai lahan perkebunan jambu mete 1-2 Ha. Tanaman

perkebunan jambu mete yang ada rata-rata telah berumur 15 -25 tahun dengan luas areal 75 Ha. Produksi jambu mete per KK/ tahun antara 350 – 500 kg/ha. (ATAP BUN, 2020).

Ada beberapa yang masih mempunyai kegiatan mengupas glondongan mete langsung sekali proses yaitu membuka glondongan dan mengeluarkan isinya berupa kacang mete. Dalam sehari (8 jam) biasanya dapat mengupas 4-5 kg glondongan mete dan menghasilkan kacang mete sebanyak 1 kg. Namun ada beberapa cara dalam mengupas mete melalui dua tahap yaitu membuka glondongan terlebih dahulu sampai glondongan habis kemudian dilanjutkan dengan tahap mencungkil kacang metenya. Dalam waktu 3 hari dapat mengupas 10-12 kg glondongan mete dan menghasilkan kacang mete sebanyak 2,5-3 kg. Pada prinsipnya kegiatan pengupasan kacang mete merupakan kegiatan yang melelahkan sehingga wajar jika harga kacang mete cukup mahal. Adanya tengkulak yang langsung membeli gelondongan mete, maka penjualan banyak dilakukan dengan menjual gelondongan dengan harga yang ditentukan tengkulak.

Di Desa Palanggay sudah terbentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Jambu Mete yaitu KWT “Lupang Tahamu” yang diharapkan mampu memberikan alternatif tambahan pengetahuan melalui keterampilan. Meskipun pendidikan para anggota relatif rendah, namun memiliki kesempatan yang sama untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. KWT ini merupakan kelompok perempuan tani yang dibentuk oleh para ibu warga Desa Palanggay. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi yaitu kesulitan mendapatkan modal usaha dan pemasaran yang masih menggunakan metode mulut ke mulut. Adanya KWT mampu menjadi suatu wadah untuk memberikan alternatif kegiatan untuk para perempuan berusia produktif.

Saat ini tercatat sebanyak 19 orang yang ikut aktif dalam kegiatan KWT Lupang Tahamu. KWT ini mampu menjadikan daya tarik warga-warga sekitar untuk secara sadar ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang

dilakukan oleh KWT Lupang Tahamu. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberdayakan perempuan pedesaan yaitu salah satunya melalui keterampilan membuat olahan makanan dari mete. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua PKK Kecamatan Pahunga Lodu yang merupakan salah satu anggota KWT Lupang Tahamu. Kegiatan ini sampai saat ini tidak dilakukan lagi karena lebih memilih menjual gelondongan dengan mendapatkan uang tunai dari tengkulak.

KWT Lupang Tahamu sebagai wadah positif untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk perempuan. Dalam hal ini KWT berperan sebagai motivator dan dibantu oleh Ketua PKK Kecamatan dan fasilitator atau Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam memberdayakan perempuan pedesaan. Peran KWT untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan salah satunya sebagai motivator. Hal ini dengan membangkitkan kesadaran perempuan pedesaan untuk senantiasa mengembangkan potensi yang dimiliki dan membantu dalam menggali motivasi diri. Para pengurus KWT berupaya agar para anggota senantiasa berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Upaya tersebut salah satunya melalui pengadaan lomba keterampilan yang telah diajarkan. Hal terpenting dalam pemberdayaan salah satunya yaitu melalui peningkatan kesadaran. Kesadaran tersebut telah dibangkitkan oleh KWT dan dibantu oleh Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan mengajak para anggota untuk aktif di masyarakat.

Dilihat dari latar belakang pendidikan terakhir para anggota KWT Lupang Tahamu, menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Rata-rata pendidikan di KWT ini hanya sampai dengan sekolah dasar (SD). Selain itu pengetahuan keterampilan mereka pun masih tergolong minim. Adanya kegiatan KWT sebagai salah satu wadah untuk memberikan pengetahuan keterampilan untuk perempuan di pedesaan. Secara tidak langsung dan mungkin tanpa disadari anggota KWT telah memperoleh pengetahuan keterampilan melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lokal yaitu pengolahan jambu mete menjadi olahan makanan. Sehingga kegiatan yang dilakukan

oleh KWT tersebut merupakan salah satu upaya pemberdayaan untuk masyarakat khususnya perempuan pedesaan di daerah tertinggal.

Adanya pertemuan rutin yang dihadiri oleh PPL dan PKK Kecamatan memberikan pemahaman arti fungsi kelompok dalam upaya turut serta pada peningkatan perekonomian terutama keluarga, kelompok dan masyarakat. Dengan pengolahan jambu mete sebagai sumber perekonomian dengan menanam sampingan tanaman baik sayur, obat atau tanaman buah/kayu. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dan harapan masyarakat. Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan juga menyampaikan agar bisa memanfaatkan pekarangan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan ekonomi serta agar pekarangan optimal untuk dijadikan lahan produktif.

Tanaman jambu mete tidak bisa diandalkan menjadi komoditi tunggal, harus dibantu dengan sumber penghasilan lain untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Harus ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan setelah musim jambu mete berakhir. Beberapa pilihan adalah berkebun beberapa jenis tanaman seperti jagung, sayuran, tomat, cabe besar, atau memproduksi gula merah, dan berjualan sembako serta hasil-hasil kebun. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga inilah, perempuan turut mengambil peran-peran penting dan memberikan sumbangsih yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya sebagai keluarga petani. Beberapa peran perempuan yang dapat diklasifikasi dalam dua peran besar yakni peran pencari nafkah, dan peran non ekonomi. Peran pencari nafkah adalah perempuan yang melakukan pekerjaan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan keluarga dari aspek ekonomi.

4.2. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

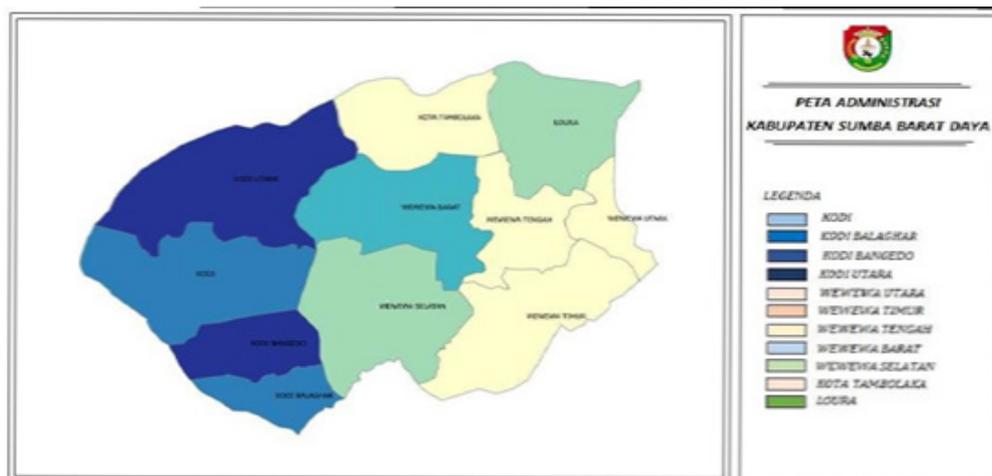
Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), baru berdiri pada tahun 2007, hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007).

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki luas wilayah daratan sebesar 1 445,32 km² atau setara dengan 144 532 Ha. Sebagian besar wilayah Sumba Barat Daya berbukit-bukit di mana hampir 50 persen luas wilayahnya memiliki kemiringan 14^o–40^o. Sumba Barat Daya terbagi menjadi 11 wilayah kecamatan yang terdiri dari 173 desa dan 2 kelurahan. Jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Kodi Utara yaitu 21 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kota Tambolaka sebanyak 8 desa. (BPS Sumba Barat Daya 2019).

Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

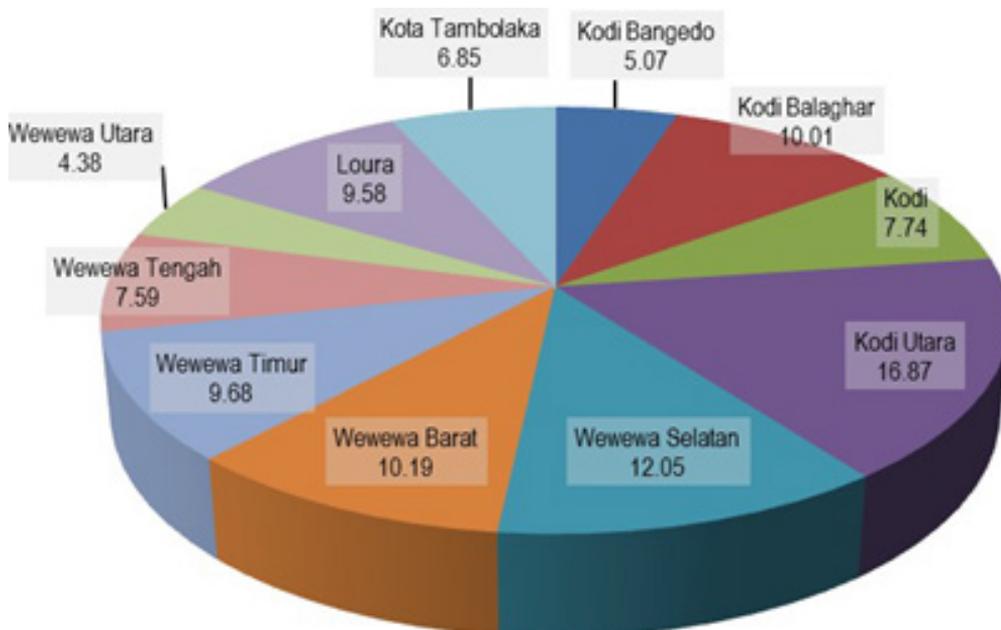
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Sumba Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat dan Samudera Hindia; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Gambar 9. Peta Kabupaten Sumba Barat Daya



Sumber: Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2021

Gambar 10. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Menurut Kecamatan Tahun 2019



Sumber: Sumba Barat Daya dalam Angka 2019

Dilihat dari topografi, Sumba Barat Daya umumnya bervariasi yaitu datar, bergelombang dan berbukit. termasuk dalam kondisi iklim yang kering. Namun sebagian kecil wilayah Sumba Barat Daya beriklim basah, di mana hanya 5 bulan (Januari sampai dengan Maret, November dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 7 bulan sisanya relatif kering (BPS 2019).

Kepadatan penduduk pada tahun 2019 adalah 238 jiwa/km². Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2019 adalah 105,38 artinya pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97%. Berdasarkan hasil Sakernas, angkatan kerja tahun 2018 berjumlah 155 953 orang dengan persentase laki-laki sebanyak 55,3% dan perempuan sebanyak 44,7%.

Tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin Sumba Barat Daya tahun 2019 sebesar 28,06% menurun dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 28,88%. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tahun 2019 sebesar 4,35 juga menurun dari tahun 2018 sebesar 5,35. Menandakan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin menurun sehingga lebih dekat dengan garis kemiskinan. Serta menurunnya indeks keparahan kemiskinan dari 1,49 tahun 2018 menjadi 0,93 di tahun 2019. Ini menandakan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin menurun sehingga ketimpangan pengeluaran penduduk miskin lebih mendekat daripada tahun sebelumnya (BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat Daya 2019).

Komoditas perkebunan yang menjadi primadona masyarakat sebagai mata pencaharian tahunan yaitu komoditas jambu mete, kopi dan kakao. Saat ini produktivitas tanaman mete sudah mulai menurun, dikarenakan umur tanaman banyak yang sudah tua, kurangnya pemangkasan, kurangnya pemupukan dan perawatan. Tanaman jambu mete hampir diusahakan di seluruh Kecamatan Sumba Barat Daya. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Sumba Barat Daya, sentra produksi jambu

mete berada di Kecamatan Kodi Utara. Adapun potensi lain yang masih belum banyak di budidayakan yaitu komoditas vanili, memiliki luasan 84,5 ha dengan total produksi 15 ton. Dalam budidayanya tersentra di Wawewa Barat, Timur, Tengah dan Utara, karena memiliki iklim mikro yang sesuai untuk pertumbuhan vanilli (BPS Sumba Barat Daya 2019).

Perkebunan jambu mete rakyat terbesar berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, meliputi enam kecamatan yaitu Loura, Kota Tambolaka, Kodi, Kodi Mbangedo, Kodi Utara dan Kodi Balaghar (tabel 2). Sampai saat ini masyarakat di Sumba Barat Daya menjadikan lahan-lahan perkebunan mereka dipenuhi tanaman jambu mete dan biji jambu mete menjadi hasil perkebunan selain komoditi lainnya seperti kelapa, pisang yang mulai berkurang dikarenakan terserang hama dan digantikan dengan jagung. Biji jambu mete dijual ke pengumpul masih dalam bentuk gelondongan (bahan mentah). Setelah dipanen atau dipetik, langsung dijual bersama kulit atau tempurungnya ke saudagar mete.

Pengembangannya jambu mete diprioritaskan di dua wilayah kecamatan yaitu Loura dan Kodi. Dua kecamatan ini, dari sisi budidaya tanaman jambu mete, dinilai sangat cocok. Iklimnya lebih kering, bulan kemarau lebih panjang daripada bulan hujan, dan lahannya masih banyak yang kosong. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi setelah Kabupaten Sikka yakni mencapai 690 kg/ha. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi daerah pengembangan jambu mete yang potensial untuk terus dilakukan khususnya di Pulau Sumba. Dengan luas areal perkebunan jambu mete di Sumba Barat Daya 10.665 Ha dengan produksi 6.019,21 Ton, sedangkan produktivitas 821 Kg/Ha.

TABEL 3. LUAS TANAMAN JAMBU METE TERBANYAK DI SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Loura	736,00	385,00	755
2.	Kota Tambolaka	889,00	594,94	985
3.	Kodi	1.766,00	1.014,00	825
4.	Kodi Mbanggedo	1.001,00	469,26	790
5.	Kodi Balaghar	1.666,00	865,80	900
6.	Kodi Utara	4.270,00	2.558,00	787

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2020

Komoditas jambu mete sebagai komoditas perkebunan rakyat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Peluang pasar yang prospektif, ketersediaan lahan yang luas, iklim yang mendukung dan jumlah petani yang terlibat merupakan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan produksi dan ekspor selain peningkatan pendapatan petani di pedesaan.

Ciri perkebunan jambu mete di Kabupaten Sumba Barat Daya umumnya dilakukan dalam skala kecil, terpencar dan tidak intensif dengan keterbatasan teknologi budidaya dan manajemen. Oleh karena usaha tani jambu mete yang berkembang umumnya usahatani keluarga skala kecil, maka dapat dikembangkan adalah pola intensifikasi, diversifikasi yang mengintegrasikan kegiatan rumah tangga dan kegiatan non usahatani. Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perkebunan telah mengusahakan banyak cara agar petani dapat mengadopsi beberapa teknologi jambu mete agar usaha taninya makin maju dan terus berkembang.

Contoh, kegiatan diversifikasi hasil yang teknologinya relatif sederhana tetapi nilai tambahnya sangat besar, belum banyak diadopsi oleh petani setempat. Padahal kegiatan diversifikasi produk jambu mete dapat didiseminasikan melalui kegiatan seperti sekolah lapang. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah setempat masih belum

maksimal, atau setidaknya metode diseminasi yang dipilih belum tepat. Upaya untuk mendorong petani agar dapat mengadopsi teknologi jambu mete harus terus ditingkatkan agar pendapatan dan kesejahteraan petani juga meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT tahun 2018 adalah 64,39. Kota Kupang memiliki IPM tertinggi yaitu 78,84. Sementara IPM Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 61,89 yang menduduki peringkat ke 14 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Penanaman awal jambu mete di Sumba Barat Daya sekitar tahun 1990 adalah program IFAD (*International Fund for Agricultural Development* disingkat IFAD) yaitu dimana adanya dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural di Kabupaten Sumba Barat Daya. Organisasi yang menangani masalah kemiskinan dan pembangunan perekonomian di daerah pedesaan. Sejak IFAD masuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya program yang dilakukan yaitu penanaman jambu mete dan mulai genjar dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Seiring dengan berjalannya waktu penanaman mulai berkurang dikarenakan berakhirnya program IFAD. Tanaman yang ada saat ini adalah tanaman yang tua dan tidak diremajakan menjadi penyebab rendahnya produktivitas tanaman. Jenis tanaman yang banyak diusahakan selain jambu mete dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 4. LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi sawah	8.340	8.163	3,3	30.230
2.	Padi Ladang	16.776,25	16.648,25	1,8	33.450
3.	Jagung	29.276	28.753	3,0	88.124
4.	Kc Hijau	494,5	274,5	0,6	196,55
5.	Kc Tanah	664	644,5	0,8	1.661
6.	Jambu Mete	13.452	12.546	0,4	8.219

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
7.	Kopi	2.131	2.071	0,7	1.5561
8.	Kakao	1.610	1.524	0,9	1.785

Sumber: Sumba Barat Daya dalam Angka 2019

Dari data diatas, luasan penanaman mete didominasi di Kecamatan Kodi Utara sebesar 4.268 ha, Komoditas Kelapa di Kecamatan Wawewa Barat dan Kodi Utara masing-masing 1.436 Ha dan 1.484 Ha, Komoditas Kopi di Kecamatan Wawewa Barat dan Selatan masing-masing sebesar 1.600 Ha, Komoditas Pinang di Kecamatan Wawewa Barat sebesar 1.028 Ha dan Komoditas Kakao di Kecamatan Wawewa Selatan sebesar 802 Ha.

4.2.1. KECAMATAN LOURA

Kajian dilaksanakan di Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Daerah 149.22 km² dengan jumlah penduduk 2.540 Jiwa, laki-laki 1.278 jiwa dan perempuan 1.264 jiwa dengan kepadatan penduduk 115 Jiwa/Km. Secara geografis wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya terbentang mulai 118o55 – 120o2 Bujur Timur dan 9o18 sampai dengan 10o20 Lintang Selatan dengan batas-batas:

1. Utara berbatasan dengan Selat Sumba
2. Selatan berbatasan dengan Wewewa Timur
3. Barat berbatasan dengan Kota Tambolaka
4. Timur berbatasan dengan Tana Righu.

Luas lahan tanaman jambu mete di Kecamatan Loura mengalami penurunan secara terus menurun. Ada beberapa hal selain faktor curah yang menyebabkan menurunnya produktifitas jambu mete. Antara lain semakin meningkatnya areal pemukiman yang semakin mempersempit lahan usaha jambu mete. Luas areal perkebunan jambu mete semakin berkurang karena adanya perluasan pemukiman. Hal lain menyebabkan

semakin berkurangnya areal tanaman yang menghasilkan. Data pada dinas terkait juga menyebutkan serangan hama penyakit ini mengakibatkan tanaman yang rusak tidak bisa di tangani sehingga dilakukan penebangan pohon jambu mete yang terserang penyakit, sehingga luasan areal perkebunan mengalami penurunan yang signifikan.

TABEL 5. LUAS LAHAN TANAMAN JAMBU METE 2018 -2020 DI KECAMATAN LOURA

No.	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha)
1.	2018	811.00	400.00	
2.	2019	794.00	382.00	755
3.	2020	736.00	385.00	755

Sumber: ATAP BUN 2019 dan 2020

Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengusahakan banyak cara agar petani dapat mengadopsi beberapa teknologi jambu mete agar usaha tani semakin maju dan terus berkembang. Sebagai contoh, di daerah ini sudah dilakukan pemanfaatan dan perekayasa lingkungan pertanaman jambu mete dengan fokus kembali ke prinsip dasar PHT (Pengendalian Hama Terpadu), pengkajian skala luas pada beberapa agroekologi, serta pembinaan pemandu dan petani melalui SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu). SLPHT telah berhasil mengurangi penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama tanaman jambu mete. Namun demikian, Sebagian besar kegiatan pembinaan jambu mete di daerah ini masih bersifat parsial, terpotong-potong dan lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat monodisiplin.

Kegiatan diversifikasi hasil yang teknologinya relative sederhana tetapi nilai tambahnya sangat besar, belum banyak diadopsi oleh petani setempat. Padahal kegiatan diversifikasi produk jambu mete dapat didiseminasikan melalui kegiatan seperti sekolah lapang. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah setempat masih belum maksimal, atau

setidaknya metode diseminasi yang dipilih belum tepat. Upaya untuk mendorong petani agar dapat mengadopsi teknologi jambu mete harus terus ditingkatkan agar pendapatan dan kesejahteraan petani juga meningkat.

Beberapa desa di Kecamatan Loura banyak perempuan yang bekerja pada pengolahan jambu mete dan sudah terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) Jambu Mete alah satunya yaitu KWT Evata 2 yang beranggotakan 19 orang. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat Daya Desa Ramma Dana sudah terdapat 3 kelompok tani perempuan dan 2 kelompok tani yang telah mengolah produk menjadi produk olahan siap jual. Serta kedua kelompok ini menjadi andalan Dinas Pertanian dalam acara-acara di tingkat provinsi ataupun nasional.

Keakraban dan kerukunan masyarakat Desa Ramma Dana terlihat pada kumpulan suatu kelompok dengan mengadakan arisan. Misalnya pada Kelompok Wanita Tani (KWT), ibu-ibu PKK, dan Gereja selalu rutin diikuti karena ada arisan didalamnya. Selain itu keakraban juga terlihat pada acara-acara keagamaan. Selain itu dalam acara-acara kesehatan seperti Posyandu para ibu dan balita yang diadakan satu bulan satu kali untuk masing-masing dapat menyatukan warga dalam kebersamaan.

4.2.2. DESA RAMMA DANA

Luas wilayah 12.86 Km², dengan jumlah penduduk 2.540 jiwa. Laki-laki 1. 278 jiwa dan perempuan 1.264 jiwa serta kepadatan penduduk 198 jiwa/Km.

Bahan baku yang tidak sulit di dapatkan oleh petani jambu mete, produksi yang mencukupi, namun apa daya lahan untuk memasarkan produk hanya di tempat saja dan ini menjadikan usaha yang telah dirintis bertahun-tahun kurang dikenal oleh pasar. Konsumen yang seharusnya menikmati produk olahan warga Desa Ramma Dana tidak mengetahui bahwa Desa Ramma Dana memiliki beraneka ragam olahan jambu mete dikarenakan proses pemasaran yang kurang.

Sekalipun di Desa Ramma Dana memproduksi bermacam-macam jenis usaha, namun untuk SDM yaitu produsen itu sendiri kurang kreatifitas dalam mengembangkan sebuah produksi olahan agar menjadi sesuatu yang lebih inovatif dan lebih dikenal masyarakat secara luas.

Pemasaran merupakan hal yang paling penting dalam membangun suatu usaha. Tanpa adanya pemasaran suatu produksi tidak akan pernah berjalan. Realitanya penduduk Desa Ramma Dana yang memiliki berbagai macam jenis olahan jambu mete yang berbeda justru mengalami hambatan dalam pemasaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan yang dimiliki. Di sisi lain juga tidak ada sosialisasi yang berkaitan tentang bagaimana cara memasarkan produk yang dihasilkan secara efektif di tengah persaingan bisnis. Untuk memasarkan produk juga membutuhkan relasi usaha yang bisa mempromosikan produk hingga keluar desa agar dapat meningkatkan pendapatan. Sedangkan warga Desa Ramma Dana belum mencoba memulai mencari relasi usaha yang banyak, khususnya yang di luar desa. Sebagai pokok inti dari suatu usaha, produksi menduduki peran yang tidak kalah pentingnya dalam perekonomian masyarakat khususnya Desa Ramma Dana. Inovasi dan kreativitas untuk menjadikan bahan baku menjadi bahan olahan yang baru belum terlalu banyak dilakukan.

Tanaman tahunan yang mendominasi dari total luasan lahan dan jumlah produksi yaitu komoditas jambu mete, diikuti oleh komoditas kelapa, kopi, pinang dan kakao. Adapun komoditas lain yang diusahakan masyarakat petani dalam luasan dibawah 1.000 ha yaitu kemiri, vanili, sirih, cengkeh dan tembakau. Semua komoditas tersebut menjadi komoditas tahunan masyarakat petani dalam mendukung matapencaharian mereka. Secara rinci 5 komoditas yang paling banyak diusahakan disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 6. LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS TANAMAN TAHUNAN, BERDASARKAN 5 JENIS TANAMAN YANG BANYAK DIUSAHAKAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2019

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Jambu Mete	10.893	1,93	5.641
2.	Kelapa	8.673	2,20	3.937
3.	Kopi	5.416	2,49	2.168
4.	Pinang	4.476	2,88	1.555
5.	Kakao	3.202	3,27	980

Sumber: Sumba Barat Daya Dalam Angka Tahun 2019

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, kualitas produktivitas mete saat ini sudah mulai menurun dan kualitasnya kecil produktivitas saat ini hanya 0,8-1 ton/ha. Hal ini dikarenakan umur tanaman mete cukup tua yaitu lebih dari 25 tahun, disamping itu kurangnya perawatan seperti pemangkasan mengakibatkan banyaknya cabang/ranting tidak produktif, yang berpengaruh terhadap rendahnya hasil panen. Disamping itu serangan hama penyakit menjadi faktor tambahan yang menyebabkan gagal panen mete.

Dalam peta distribusi rantai pasok, mayoritas petani menjual hasil panen mete ke tengkulak/pengepul kecil lintas desa dan pengepul sedang di kecamatan dalam bentuk mete glondongan dengan harga Rp 11.000-12.000/kg. Dalam hal ini tidak ada penambahan nilai yang dilakukan oleh petani. Selain itu petani pribadi bisa langsung menjual ke pengepul besar di kabupaten namun tetap dengan harga Rp 11.000-12.000/kg. Berbeda dengan tengkulak/pengepul kecil dan sedang yang sudah bermitra, mereka menjual mete glondongan ke pengepul besar kabupaten dengan harga Rp 13.000/kg, dengan margin tengkulak/pengepul sebesar Rp.1.000/kg. Rantai nilai mete di Kabupaten Sumba Barat Daya mulai dari petani hingga pengepul besar kabupaten dalam bentuk mete glondongan dengan perlakuan sortasi berada di pengepul.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu kualitas biji mete petani rendah, pasokan tidak kontinu dan kuota target tidak terpenuhi.

Gambar 11. Bagan Alur Rantai Pasok di Kabupaten Sumba Barat Daya



5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH TERTINGGAL

Kegiatan pemberdayaan sejalan dengan Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 yakni untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa terutama di daerah tertinggal. Diantaranya adalah peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas di desa, dan pengembangan ketahanan masyarakat desa.

Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan *SDGs Desa (Sustainable Development Goals) Desa* dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Dimana *SDGs* Desa point 5 adalah keterlibatan perempuan desa.

Dengan adanya program desa ramah perempuan dan peduli anak diharapkan bisa menjadi strategi kedepannya untuk mencapai akselerasi pencapaian *SDGs* diseluruh desa se- Indonesia dan dapat memastikan perempuan dan anak menjadi bagian pembangunan perdesaan dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan memastikan peraturan dan kebijakan perdesaan yang dihasilkan lebih ramah perempuan dan mengedepankan perlindungan anak.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk melaksanakan Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak sebagai strategi akselerasi pencapaian *SDGs* Desa oleh Kemendes PDTT dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Lahirnya kebijakan yang berperspektif perempuan akan mempermudah perempuan menjemput berbagai kesempatan yang selama ini sulit mereka akses. Program ini sendiri tertuang pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan menjadi salah satu program prioritas dalam rangka pembangunan nasional. Kondisi demikian dapat meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan, serta mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Hal lain yang didapatkan yakni meningkatnya kualitas peran dan kemandirian perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal sangat berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian, untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. Sehingga dengan kata lain, memberdayakan perempuan berarti memberdayakan suatu bangsa.

Masyarakat di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat Daya sangat dipengaruhi oleh budaya, agama yang dianut, struktur sosial dan pendidikan. Karena itu prospek pemberdayaan tidak lepas dari budaya lokal setempat.

Sebagian besar masyarakatnya di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya bekerja sebagai petani dan perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan jambu mete, dimana jambu mete merupakan salah satu penghasilan di lokasi kajian. Untuk pengolahan mete perempuan mengambil peran dalam kegiatan pra produksi, produksi, dan pasca produksi dengan keikutsertaan perempuan yang lebih besar. Selama ini terjadi anggapan terhadap peran perempuan di daerah tertinggal dalam pemenuhan pangan dianggap hanya berperan dalam proses pengolahan bahan pangan, sesungguhnya telah terlibat sejak dalam proses tanam, perawatan hingga panen, sampai pada pengolahannya hingga dapat dikonsumsi.

Kendala perempuan di daerah tertinggal yaitu rendahnya pendidikan formal perempuan petani disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mendukung. Selain itu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Rendahnya pendidikan formal yang dimiliki perempuan di daerah tertinggal akan sangat mempengaruhi keterampilan dan sikap serta kemampuan mereka dalam menyerap informasi dan teknologi. Sehingga akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan sangat terbatas. Disamping itu terkait dengan aktivitasnya sebagai petani, maka rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan usaha taninya, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kontribusinya terhadap ekonomi keluarga.

Bekerja di bidang pertanian merupakan pilihan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan di daerah tertinggal. Selain karena kondisi lingkungan yang mendukung, faktor suami yang bekerja sebagai petani juga ikut mendorong mereka bekerja membantu suaminya.

Kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan dan ekonomi di daerah tertinggal menyebabkan perempuan untuk secara sukarela akan bekerja membantu ekonomi keluarga.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah tertinggal harus masuk dan terintegrasi pada setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat besarnya jumlah perempuan dan pentingnya peran serta perempuan dalam pembangunan di daerah tertinggal. Perempuan sebagai potensi yang besar baik sebagai anggota keluarga yang melahirkan dan membesarkan generasi penerus bangsa maupun perempuan sebagai agen pembangunan yang memerlukan ruang gerak yang lebih luas di segala bidang. Perempuan bukan hanya sebagai objek dalam pemberdayaan tetapi perlu dilibatkan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program.

Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan pada kenyataannya masih banyak yang belum dapat terbedaya karena berbagai faktor penyebab yang melatar belakangnya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. (Kantor Menteri Peranan Perempuan, 1999).

5.2. PEREMPUAN DALAM ASPEK SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

Dari aspek sosial, tanggung jawab utama perempuan untuk mengurus rumah tangga dan keterbatasan kondisi ekonomi mendesak para perempuan di daerah tertinggal melakukan kerja rumahan dengan tujuan agar perempuan bisa mendapatkan penghasilan sambil tetap melakukan aktivitas domestik (memasak, mencuci, mengurus anak, membersihkan rumah, dan sebagainya). Di sisi lain, sifat kerja rumahan yang fleksibel

justru memberi beban ganda kepada perempuan. Perempuan melakukan kerja rumahan tanpa mengenal waktu dengan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Untuk kerja yang mereka lakukan dalam kajian ini yaitu pengolahan jambu mete dan hanya mendapatkan hasil dari biji gelondongan yang mereka jual di pengumpul dengan harga yang tidak sepadan. Perempuan dengan peran ganda, memiliki waktu domestik dan waktu publik yang berdampak dalam kehidupannya. Hal ini berpengaruh pada kondisi sosial, dimana perempuan mengolah jambu mete tetap memiliki interaksi sosial yang baik dengan keluarga, bahkan memperluas pergaulan dengan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat di lokasi kajian dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah penguatan peran dan aktivitas keorganisasian sosial agar supaya pengembangan kualitas diri perempuan di bidang pengembangan wawasan, pengembangan kemampuan berorganisasi, pengembangan kreativitas, pengembangan pengetahuan dan pengembangan peran dalam membantu masyarakat menuju perkembangan pembangunan desa bisa berjalan dengan baik.

Adapun kekuatan yang ada dalam aspek sosial adalah bahwa telah ada organisasi sosial seperti PKK atau Darma Wanita, kelompok koperasi dan arisan-arisan kelompok perempuan, dan beberapa kelompok pertemuan perempuan lain. kekuatan organisasi seperti PKK ini bisa menjadi sarana pembantu bagi partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Dari aspek ekonomi, profesi perempuan pengolah jambu mete tidak menaikkan kesejahteraan secara signifikan karena rendahnya hasil yang diterima. Namun dengan kemandirian ekonominya, perempuan memiliki peran yang aktif dalam pengambilan keputusan di keluarga. Tuntutan sosial ekonomi yang dibebankan kepada perempuan juga mendorong masyarakat untuk tidak bertindak diskriminatif.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, perempuan turut mengambil peran-peran penting dan memberikan sumbangsih yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dari aspek ekonomi sebagai keluarga petani.

Keterlibatan perempuan dalam pengolahan jambu mete mempunyai kontribusi waktu yang dicurahkan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan keterbukaan menerima kemauan dan kemampuan. Perempuan dapat diterima terlibat langsung tanpa mengganggu aktivitas kodratnya sebagai ibu rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan dalam pengolahan jambu mete.

Umumnya harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata perempuan bekerja di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga, tetapi ada beberapa motivasi lain, seperti suami tidak bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga dan adanya keinginan mengaktualisasikan diri.

Perempuan di lokasi kajian cukup memiliki inisiatif yang baik dalam mengembangkan pendapatannya yaitu dengan pengolahan jambu mete di tengah persaingan produk lokal, tetapi tidak tahu bagaimana caranya agar usaha mereka dapat berkembang dan dari tahun ketahun tetap saja stagnan tanpa ada perkembangan perekonomian yang lebih baik.

Kendala utama yang dialami adalah mengenai pemasaran yang tidak bisa bersaing dengan produk lain. Kendala lain juga menghambat perkembangan usaha itu antara lain seperti tidak adanya mitra usaha yang mampu diajak kerjasama dengan baik yang bisa membantu memasarkan produk, serta produk yang tidak memiliki brand sehingga belum dikenal oleh masyarakat.

Perempuan yang berdaya secara sosial-ekonomi akan mendorong terwujudnya keberhasilan pembangunan di daerah tertinggal. Selama ini perempuan di daerah tertinggal belum cukup dihadirkan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

Dari aspek budaya, sistem budaya patriarki masih sangat kuat di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya, perempuan cenderung ditempatkan di sektor domestik, sehingga seringkali tidak bernilai ekonomi tinggi. Disamping itu karakter masyarakat yang masih banyak mementingkan budaya pesta yang berlebihan menjadi faktor utama tingginya kemiskinan disamping rendahnya dukungan dari pemerintah kabupaten.

Budaya patriarki ini menganggap bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan dan anak-anak. Perempuan bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga (reproduktif) sedangkan laki-laki bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama. Pekerjaan produktif yang dilakukan oleh perempuan hanya dianggap sebagai tambahan saja. Namun demikian secara umum sudah terjadi kemajuan yang cukup baik antara laki-laki dan perempuan walaupun belum terjadinya keseimbangan peran yang sempurna antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan budaya masyarakat tradisional yang patriarki.

5.3. PEREMPUAN DALAM PENGOLAHAN JAMBU METE

Pada lokasi kajian, dimana ekonomi di sektor pertanian menjadi motor utama dalam ekonomi keluarga. Masyarakat yang didominasi merupakan masyarakat petani tidak terlepas dari keterlibatan perempuan dalam aktivitasnya sebagai petani jambu mete baik secara langsung maupun tidak langsung

Musim panen jambu mete berkisar pada bulan September hingga Desember di setiap tahunnya. Kondisi yang terlihat pada saat pasca panen adalah buah mete hanya dijual gelondongan dan sebagian kecil saja dijual dalam bentuk kupasan (siap goreng). Harga jual buah mete dalam bentuk

gelondongan saat ini berkisar Rp15.000,- per kg hingga Rp18.000,- per kg. Namun pada suatu waktu dapat mengalami perubahan harga secara signifikan yaitu pada level terendah pada kisaran harga Rp10.000,- dan level tertinggi pada kisaran harga Rp20.000,- tergantung dari kuantitas produksi dan kualitas buah mete tersebut. Namun jika dibandingkan dengan buah mete yang telah dikupas menjadi kacang mete, dimana dalam setiap 5 kg buah mete menghasilkan 1 kg kacang mete maka harga jualnya dapat mencapai Rp150.000,- per kg hingga Rp200.000,- per kg. Terlihat bahwa keuntungan yang bakal diperoleh adalah berlipat-lipat. Sangat disayangkan peluang tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Beberapa kendala yang dijumpai di lapangan sebagai factor penyebab pengelolaan pasca panen kurang berjalan dengan baik adalah minimnya peralatan untuk mengupas buah mete. Disisi lain dalam hal pemasaran juga menjadi kendala akibat belum adanya penampung hasil panen. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil pasca panen buah mete. Kondisi demikian memicu munculnya tengkulak yang justru tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa permainan harga kerap muncul diantara tengkulak tersebut. Dilema akhirnya timbul di masyarakat yaitu antara menjual buah mete pasca panen berupa gelondongan yang jelas mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya dan tenaga lagi, atau melalui pengolahan lebih lanjut dalam bentuk kacang mete yang tentunya memiliki harga jual yang lebih tinggi namun perlu waktu lama, biaya dan tenaga.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemakaian teknologi tepat guna yang sudah ada berupa kacic (alat pembelah biji mete) perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga masyarakat termotivasi untuk mengolah buah mete pasca panen dalam bentuk kacang mete. Bila hal-hal diatas dapat dikondisikan dengan baik maka dapat diprediksi bahwa jalan menuju kesejahteraan masyarakat akan terbuka lebar. Karena bagaimanapun juga tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan refleksi dari keberhasilan roda pembangunan.

Tanaman jambu mete menjadi andalan dalam ekonomi keluarga dikarenakan tanaman tersebut banyak dibudidayakan di lokasi kajian, tetapi masih dalam skala kecil atau rumah tangga. Pengolahan jambu mete telah memberikan penghidupan dan kesempatan kerja bagi sebagian besar perempuan baik sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok. Akan tetapi tanaman jambu mete tidak bisa menjadi komoditi tunggal, harus dibantu dengan sumber penghasilan lain untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Harus ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan setelah musim jambu mete berakhir. Beberapa pilihan adalah berkebun beberapa jenis tanaman seperti jagung, sayuran, tomat, cabe besar, atau memproduksi gula merah, dan berjualan sembako serta hasil-hasil kebun.

Cara pengolahan yang masih sederhana, peralatan yang belum memadai, pengetahuan tentang pentingnya sanitasi yang masih terbatas, serta belum tersedianya kelembagaan yang menunjang. Akibatnya mutu produk yang dihasilkan relatif rendah (banyak biji belah dan hancur, warna kusam, kotor dan keriput), sehingga perlu dilakukan usaha peningkatan mutu antara lain melalui penyempurnaan proses penanganan pascapanen dan pengolahan hasilnya.

Mutu kacang mete seperti produk pertanian umumnya ditentukan oleh beberapa faktor, baik menyangkut pra panen maupun pasca panen. Faktor pra panen yang menyangkut bahan tanaman, teknik budidaya, cara dan waktu panen maupun faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan mutu bahan olah. Sedangkan faktor pasca panen yang mencakup penanganan bahan olah, cara pengolahan termasuk alatnya, pengemasan, dan penyimpanan sangat berpengaruh pula terhadap mutu produk akhir.

Pada umumnya proses pengolahan mete di tingkat rumah tangga dilakukan bersama-sama antara anggota laki-laki dan perempuan dengan jumlah waktu yang berbeda-beda. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa peran perempuan lebih dominan dibandingkan dengan peran laki-laki.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, keterlibatan perempuan pada panen dan pasca panen jambu mete yaitu:

1. Panen. Panen buah mete umumnya dilakukan dengan memetik buah-buah yang telah masak dipohon atau memungut buah-buah yang telah gugur di tanah tetapi sudah matang. Pemetikan buah mete ini tidak dapat dilakukan sekaligus karena buah mete tidak masak secara bersamaan, pemetikan dapat dilakukan setiap 3 – 5 selama 2 – 3 bulan. tergantung pada banyaknya buah. Kegiatan ini dikerjakan secara bersama-sama dengan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan;
2. Pemisahan gelondong dari jambunya merupakan salah satu hambatan dalam pengolahan biji mete adalah cara mengupas untuk memperoleh bijinya secara utuh. Kegiatan ini dikerjakan secara bersama-sama dengan proporsi yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan;
3. Penjemuran gelondong dikerjakan secara bersama-sama dengan proporsi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki;
4. Pengacipan umumnya dilakukan oleh perempuan dan biasanya dibantu oleh anak-anak. Mereka mengkacip mete gelondongan yang dibeli dari petani lain. Apabila sudah tidak musim panen dan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan mete, mereka baru mengkacip mete gelondongan dari kebun sendiri;
5. Pencukilan menjadi kacang mete/ ose dikerjakan secara bersama-sama dengan proporsi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki;
6. Pemanggangan dikerjakan secara bersama-sama dengan proporsi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki;
7. Pengupasan kulit ari saat panas dikerjakan secara bersama-sama dengan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki; pengupasan kulit ari biasanya dilakukan oleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.
8. Penjemuran kacang mete biasanya dikerjakan oleh perempuan;

9. Penjualan atau penyeteroran kacang mete kering ke pedagang pengumpul biasanya dikerjakan oleh perempuan yang kemudian oleh pedagang pengumpul dilakukan grading ABC yang siap untuk dikirim ke pembeli di luar kota.

Jika dilihat pembagian kerja perempuan pada pemanenan dan pengolahan mete ini memang proporsinya lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan oleh laki-laki, mengingat kegiatan pengolahan masih dilakukan di rumah. Rata-rata pada saat musim mete, seorang perempuan mampu untuk bekerja selama 6 jam per hari dalam pengacipan mete dan sanggup mengacip sebanyak 5–6 kg mete gelondongan.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengolahan kacang mete terdistribusi pada tiap-tiap kegiatan dimulai dari panen sampai dengan pemasaran. Berdasarkan hasil kajian secara umum keterlibatan perempuan adalah lebih dominan daripada laki-laki dalam pengolahan jambu mete. Mengingat pengolahan jambu mete memerlukan kemampuan fisik lebih sedikit, akan tetapi kemampuan psikis sangat dibutuhkan seperti kesabaran dan ketelitian. Waktu yang dicurahkan untuk pengelolaan jambu mete terbagi dengan waktu untuk keluarga.

Untuk pengolahan biji mete menjadi kacang mete yang telah berlangsung di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya hanya menggunakan alat-alat dalam jumlah terbatas. Kemasan kacang mete yang telah ada hanya berupa kemasan plastic tanpa label, padahal label dari sebuah kemasan sangatlah penting artinya, untuk menunjukkan identitas barang yang dikemas seperti bahan baku, komposisi gizi dan tanggal kedaluwarsa.

Rantai distribusi produk jambu mete yang sering digunakan sangat panjang. Menjual dalam bentuk gelondongan kepada pengumpul di tingkat desa/kecamatan. Pengumpul di tingkat kecamatan/desa menjual kembali produk yang dibeli dari petani pada pengumpul di tingkat kabupaten. Setelah itu pengumpul di kabupaten mengirim mete ke pasar

Surabaya, Makasar, Ujung Pandang. Dari kota-kota besar tersebut, mete ada yang langsung diolah oleh perusahaan-perusahaan di kota tersebut, ada pula yang masih dikirim lagi ke rantai pemasaran berikutnya.

Masyarakat di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya tidak memotong rantai distribusi produk yang terlalu panjang ini karena menurut mereka, keberadaan para pengumpul terutama pengumpul di desa lebih menguntungkan. Selain menghilangkan biaya pengiriman produk, para pengumpul ini dapat menyediakan kebutuhan uang kontan yang selalu mereka butuhkan. Karena modal petani dan pengkacip sangat kecil, mereka membutuhkan aliran uang kontan secepatnya.

Alokasi waktu perempuan di daerah tertinggal dalam melakukan pengolahan mete selalu dikombinasikan dengan beberapa kegiatan domestik/rumahtangga lainnya, misalnya sambil mengasuh anak, berhenti sebentar untuk memasak kemudian meneruskan menjemur atau mengacip mete, berhenti sebentar untuk menjemur pakaian kemudian meneruskan menjemur atau mengacip mete dan sebagainya.

5.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI (KWT)

KWT merupakan salah satu strategi dalam membentuk organisasi usahatani sebagai bentuk pemberdayaan, sebagai kelembagaan masyarakat yang pengembangan usahatani masyarakat desa dan pengembangan masyarakat pengentasan kemiskinan mencapai tarap hidup yang lebih baik di masyarakat. Sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat petani yang sepenuhnya dikelola oleh kaum perempuan yang bergerak dalam bidang pertanian dan usahatani agribisnis, yang memiliki fungsi untuk menciptakan kesejahteraan.

KWT telah menjadi kelembagaan petani kaum perempuan yang memiliki khalayak usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisien usaha yang baik salah satunya memiliki program pemberdayaan berbasis sumber daya lokal. Dalam hal ini pemberdayaan dilaksanakan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang terdiri dari sumber daya lokal.

Pemberdayaan sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan agar bisa hidup mandiri. Salah satu wadah untuk pemberdayaan perempuan ialah KWT. Dengan dibentuknya KWT ini maka dapat mejadi wadah perempuan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan.

Dari beberapa deskripsi dan informasi dari Ketua KWT, pada saat ini khususnya pada lokasi kajian dapat dikatakan hampir tidak ada kendala atau hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, baik dari sisi kebijakan, peraturan dan perundangan; kultur, budaya, norma, adat, agama; lingkungan keluarga maupun lingkungan pada umumnya.

Temuan kajian juga menunjukkan bahwa pertemuan merupakan kegiatan utama dalam membangun hubungan antar berbagai elemen masyarakat. Melalui berbagai forum pertemuan tersebut, kaum perempuan memperkuat keberadaannya baik secara pribadi maupun kelembagaan. Dengan adanya forum pertemuan yang dijadwalkan oleh kaum perempuan secara berkala di tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa, memungkinkan lembaga-lembaga lebih aktif dan termotivasi mengadakan berbagai kegiatan dalam komunitas. Yang demikian dapat dilihat dari aktivitas kader perempuan dalam memotori berbagai kegiatan dalam komunitas di level desa sampai pada kecamatan, seperti penyelenggaraan pendidikan non formal dan keterampilan, olahraga dan kesenian.

Keakraban dan kerukunan masyarakat terlihat pada kumpulan suatu kelompok dengan mengadakan arisan. Misalnya KWT, ibu-ibu PKK, dan Gereja selalu rutin diikuti karena ada arisan didalamnya. Selain itu keakraban juga terlihat pada acara-acara keagamaan. Selain itu dalam acara-acara kesehatan seperti Posyandu para ibu dan balita

yang diadakan satu bulan satu kali untuk masing-masing Desa juga menyatukan warga dalam kebersamaan.

KWT sangat diperlukan, maka program pemberdayaan perempuan berupa pelatihan pengolahan jambu mete sangat dibutuhkan dengan tidak mengesampingkan proses pendampingan dalam proses pelatihan. Dalam pemberdayaan tentunya tidak serta merta hanya membuat suatu pelatihan saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan.

Untuk itu perlu meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kebijakan desa yang responsif gender seperti menyusun Perdes/SK Kades tentang pemberdayaan perempuan, program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis rumah tangga, bantuan permodalan dan pelatihan kewirausahaan mandiri, dan pembentukan dan pelatihan bagi kader desa tentang gender.

Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan potensi keterampilan pengolahan mete, misalnya mengolah remukan mete menjadi rempeyek, olahan coklat mete. KWT diberdayakan dengan meningkatkan kualitas keterampilan dan pengetahuan perempuan khususnya bidang pemasaran hasil olahan komoditi lokal, misalnya olahan mete.

Selama ini terjadi anggapan terhadap peran perempuan di daerah tertinggal dalam pemenuhan pangan dianggap hanya berperan dalam proses pengolahan bahan pangan, sesungguhnya telah terlibat sejak dalam proses tanam, perawatan hingga panen, sampai pada pengolahannya hingga dapat dikonsumsi.

Keterbatasan akses perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, serta produk kebijakan yang tidak peka gender semakin memarginalisasi kaum perempuan. Peran aktif perempuan justru membuat pembangunan efektif dan efisien, terlebih lagi pembangunan di daerah tertinggal

karena yang bersinggungan langsung dengan kehidupan keseharian dirinya, keluarga, dan masyarakat. Apabila perempuan tidak dilibatkan, maka bisa dipastikan kebijakan yang dihasilkan dalam pembangunan desa di daerah tertinggal tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan realita dan tidak menjawab problematika.

5.5. KENDALA DAN HAMBATAN PENGOLAHAN BUAH JAMBU METE

Masalah utama mete di lokasi kajian adalah rendahnya produktivitas tanaman dan mutu produk yang dihasilkan. Beberapa kendala yang dijumpai di lapangan sebagai faktor penyebab pengelolaan pasca panen kurang berjalan dengan baik adalah minimnya peralatan untuk mengupas buah mete. Disisi lain dalam hal pemasaran juga menjadi kendala akibat belum adanya penampung hasil panen. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil pasca panen buah mete. Kondisi demikian memicu munculnya tengkulak/pengepul yang justru tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa permainan harga kerap muncul diantara tengkulak tersebut. Dilema akhirnya timbul di masyarakat yaitu antara menjual buah mete pasca panen berupa gelondongan yang jelas mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya dan tenaga lagi, atau melalui pengolahan lebih lanjut dalam bentuk kacang mete yang tentunya memiliki harga jual yang lebih tinggi namun perlu waktu lama, biaya dan tenaga.

Dalam kondisi demikian sangat perlu kiranya pihak pemerintah bersama dengan masyarakat saling bersinergi untuk mengelola secara nyata komoditas jambu mete tersebut, sehingga memberikan nilai ekonomi lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Pendampingan dari instansi terkait mutlak diperlukan agar mampu memberikan semangat dan motivasi.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemakaian teknologi tepat guna yang sudah ada berupa “kacip” perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga masyarakat termotivasi untuk mengolah buah mete pasca panen dalam bentuk kacang mete. Bila hal-hal di atas dapat dikondisikan dengan baik maka dapat diprediksi bahwa jalan menuju kesejahteraan masyarakat akan terbuka lebar karena bagaimanapun juga tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan refleksi dari keberhasilan roda pembangunan.

Hasil panen jambu mete dihadapkan dengan posisi tawar yang rendah terhadap pasar sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan petani. Rendahnya posisi tawar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya kualitas panen, penjualan dengan bentuk glondongan, skema penjualan masih dijalankan sendiri-sendiri, kelembagaan petani (poktan/gapoktan) belum banyak mengambil peran dalam rantai nilai, rendahnya pemahaman pasar, inovasi produk dan akses permodalan serta dukungan pemerintah yang belum merata. Masalah dari pengolahan mete adalah petani belum mengenal luas teknologi tepat guna “pengkacipan mete” (proses pemisahan kacang mete dari biji gelondongan), keterbatasan modal dan tenaga kerja.

Hambatan yang ada dalam proses pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal adalah sarana dan prasarana yang belum optimal, minimnya kapasitas SDM perempuan, terbatasnya akses jaringan pemasaran produk serta terbatasnya bantuan permodalan.

1. Adapun kendala yang dihadapi kelompok diantaranya, lemahnya komitmen anggota kelompok untuk ikut serta dalam proses pengolahan produk
2. Kemasan yang kurang menarik dan mudah rusak, dikarenakan di Sumba Barat Daya masih belum ada jasa cetak kemasan, saat ini mengandalkan pemesanan dari Surabaya dan Yogyakarta
3. Belum adanya ijin PIRT/BPOM dikarenakan tidak adanya rumah produksi
4. Minimnya alat produksi (alat *vacuume sealer* dan alat penepung)

5. Lemahnya akses pemasaran.

Adapun manfaat lain yang perlu di manfaatkan dari jambu mete adalah:

1. Pemanfaatan potensi limbah tanaman jambu mete sebagai sumber pakan ternak,
2. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik untuk tanaman jambu mete, penciptaan lapangan baru di daerah tertinggal,
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan usaha agribisnis yang berdaya saing, ramah lingkungan dan mandiri.

Gambar 12. Alur Proses Pengolahan Mete di Tingkat Rumahtangga



6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta, data dan hasil pengamatan di lapangan serta analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan perempuan dalam mengolah jambu mete tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu kehadiran pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk lebih memperhatikan perempuan dalam pengelolaan jambu mete demi mewujudkan ketahanan pangan, baik lokal maupun nasional.
2. Pengolahan jambu mete telah memberikan penghidupan dan kesempatan kerja bagi sebagian besar perempuan baik sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok.
3. Perlunya upaya dalam menentukan program-program pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat.
4. Belum adanya kelembagaan Perusda atau Bumdes yang secara legal memayungi kegiatan produksi sampai pemasaran jambu mete sehingga menyulitkan petani untuk memasarkan jambu mete ke pasar domestik maupun e-commerce.
5. Hambatan dan kendala pengembangan jambu mete di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kegiatan jambu mete di NTT masih bersifat parsial

dan berorientasi pada kegiatan monodisiplin dengan skala keluarga, pemanfaatan kegiatan teknologi masih sederhana dan upaya Pemda belum maksimal serta pohon jambu mete yang sudah menua, perlu peremajaan jambu mete.

6.2. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi hasil kajian sebagai berikut:

1. Diperlukan campur tangan pihak pemerintah setempat dalam hal menyediakan media pemasaran karena yang menjadi kendala selama ini adalah tempat untuk memasarkan produknya agar bisa dipasarkan secara berkesinambungan.
2. Inovasi teknologi harus terus diupayakan sebagai langkah penting dan strategis dalam membantu petani jambu mete untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, baik kualitas maupun kuantitas, walaupun kondisi petani masih jauh dari yang diharapkan, karena dukungan untuk memperbaiki kondisi tersebut tidak terlepas dari pengambil kebijakan.
3. Perlu adanya program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal yaitu produk samping dalam pengolahan jambu mete sebagai nilai tambah.
4. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat di daerah tertinggal, maka dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dalam luasan lahan atau melihat ukuran fisik saja, tetapi juga harus memperhatikan permasalahan sosial budaya masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- AMW, Pranaka dan Vidhandika Moeljarto. 2011. *Pemberdayaan (empowerment) dalam Graha Ilmu*.
- BKKBN, 1999, *Materi Dasar Pelaksanaan Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, Jakarta.Kabupaten Aceh Tamiang). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/12>
- Hubeis, Aida Vitayala S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dan Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press. Jakarta: Gema Insani
- Kajian Gender: Pendekatan (WID, WAD, DAN GAD) Perempuan Dalam Pembangunan*. 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). *Perempuan dan Industri Rumahan*.
- MB, Miles dan AM. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2015. *Desa: Dinamika Kehidupan Sosial di Desa*. Jakarta: Publica Press
- Nawawi. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rekro, Harijani Doni. 2001. *Etos Kerja Perempuan Desa*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Siagian, V. J. 2015. *Outlook Jambu Mete*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Siti, Muslikhati. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*.
- Soetjipto, Ani W dan Shelly Adelina. 2013. *Pemberdayaan Perempuan Desa*. Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri.

- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Teguh, Sulistiyani Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wulansari, 2011 dalam (<http://digilib.unila.ac.id/21148/14/BAB%20II.pdf>)
- Yunus, Muhammad. 2011. *Bisnis Sosial; Sistem Kapitalism Baru yang Memihak Kaum Miskin*. Jakarta: Gramedia.
- Zakiyah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan*. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*.

Website

- (<http://pphpbun.ditjenbun.pertanian.go.id/uploads/download/1509348341.pdf>)
- (<http://kakniam.wordpress.com/tag/kacang-mete/.JembatanMinyakMete>).
- (https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046.pdf/)
- (<http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Perempuan-dan-Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs.pdf>)

Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
- Instuksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum PPM

Infografis

Badan Pusat Statistik (BPS), 2019. Perempuan dan Laki-laki Indonesia. Statistik Perkebunan Indonesia 2018 – 2020.

BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat Daya 2019

BPS Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Angka 2019.

Intellectual Wisdom for Smart Policies



www.kemendes.go.id 
pusbangjak@gmail.com 
[@pusbangjak_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes) 
[@Pusbangjak](https://twitter.com/Pusbangjak) 
[PUSBANGJAK.KDPDTT](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK.KDPDTT) 

Kementerian Desa PDTT 
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan
Jl. TMP Kalibata No.17
Pancoran, Jakarta Selatan